



Booklet phx #19

PENDIDIKAN

Booklet Seri 19

Pendidikan

Oleh: Phoenix

Pendidikan adalah inti dari pembangunan, inti dari kemajuan, dan inti dari peradaban. Pendidikan adalah sebuah proses agar setiap manusia dapat mengutuhkannya sendiri dalam kehidupan. Pendidikan secara luhur bermakna bagaimana seseorang menemukan jalan hidupnya. Namun sayang, bagaikan sebuah kutukan, apa yang awalnya diharapkan untuk menjadi hasil dari pendidikan, justru balik menyerang pendidikan itu sendiri, menciptakan ironi dalam peradaban manusia.

Ada apa dengan pendidikan? Ku coba paparkan fenomena yang ada. Kesimpulannya apa terserah pada pembaca. Yang ku tahu, tak ada yang bisa disalahkan dari keadaan saat ini, dengan semua dilema dan ironinya.

(PHX)

Daftar Konten

Penindasan Pendidikan

5

Penindasan Pendidikan 2

21

Balada Korupsi Indonesia

33

Antara Intelektual dan Sebuah Institut 4

47



Penindasan Pendidikan

“Mereka tahu hasil $2 + 2 = 4$ tapi tak tahu mengapa 2×2 juga sama dengan 4.”

— Goenawan Mohamad —

Manusia selama ribuan tahun telah menempuh berbagai proses dan dinamika yang sedikit demi sedikit membentuk jaringan yang semakin kompleks dalam alur waktu. Seiring dengan berkembangnya kecerdasan manusia, berbagai implikasi turut mengikuti sebagai bentuk kekuatan pengaruh manusia terhadap semua aspek yang ada, dari sesederhana permasalahan mencari makan hingga berkembangnya teknologi informasi. Dengan proses perkembangan ini, satu per satu sektor permasalahan muncul sebagai bentuk pemekaran dari kompleksitas. Hingga akhirnya saat ini, ketika kita semua mencoba melihat permasalahan di Indonesia, yang terlihat bagaikan adalah berbagai kotak-kotak

sektor yang seakan memiliki masalahnya sendiri secara terpisah-pisah.

Walaupun begitu, betapapun banyak pendapat yang masing-masing merujuk pada salah satu sektor sebagai yang terpenting dalam permasalahan satu komunitas atau kelompok manusia, namun hampir dapat kita sepakati bahwa nasib suatu komunitas, atau bangsa dalam konsep luasnya di masa depan sangat bergantung pada kontribusinya pada apa yang kita kenal dengan pendidikan. Sehingga betapa besarnya permasalahan yang ada pada suatu bangsa, sebenarnya dalam jangka panjang dapat kita lihat bersumber dari satu permasalahan, yakni pendidikan.

Menjadi Manusia

Mengapa pendidikan seakan menjadi *causa prima* dari berbagai permasalahan lainnya adalah karena pendidikan yang bertanggung jawab penuh pada manusia sebagai subjek dan objeknya. Sudah banyak pendapat yang dikemukakan oleh para pakar dan akademisi mengenai definisi dari pendidikan itu sendiri. Namun, semua merujuk pada satu pengertian sederhana yaitu bahwa pendidikan adalah proses memanusiaikan manusia. Pendidikan berlandaskan penuh dengan hakikat kita

semua sebagai manusia, sehingga sederhananya, manusia membutuhkan pendidikan untuk dapat sepenuhnya menjalani kehidupannya baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Betapa fundamentalnya permasalahan pendidikan membuat pendidikan menjadi kunci utama permasalahan kelompok manusia lainnya, dari ekonomi hingga politik.

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan dalam sejarahnya selalu disertai kutub dikotomi hakikat

manusia, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hal ini membuat dinamika kehidupan manusia selalu merupakan konflik antara prinsip individualisme yang menuntut individu untuk menjadi 'dirinya sendiri', dan prinsip kolektivisme yang menganggap individu sebagai bagian kolektif dari kelompok dan memiliki fungsi tertentu untuk mendukung keseluruhan tujuan bersama. Kita tidak dapat mengatakan salah satu dari prinsip ini yang harus diprioritaskan, oleh karena itu pendidikan sebagai bagian penting pembentukan manusia harus melibatkan dua dimensi ini. Setiap individu, selain memiliki potensi yang bersifat pribadi untuk dikembangkan, juga memiliki nilai dan norma yang harus dipatuhi sebagai dampak posisi dan interaksinya terhadap lingkungannya. Keseimbangan antara keduanya akan menghasilkan manusia yang seutuhnya.

Mengenai manusia yang seutuhnya, secara etika ini berkaitan mengenai bagaimana kita memandang manusia itu sendiri. Immanuel Kant pernah melakukan refleksi terhadap hakikat manusia yang menghasilkan suatu pandangan bahwa norma dasar terpenting adalah martabat manusia. Dalam konteks ini menurut Kant harus dibedakan antara "harga" (*price*) dan

"martabat" (*dignity*). Perbedaan sederhananya adalah "harga" selalu bisa diganti sesuatu yang lain. Untuk sesuatu mempunyai "harga", selalu tersedia sebuah ekuivalen yang dapat menggantikannya, sedangkan sesuatu yang mempunyai martabat adalah unik dan tidak dapat disetarakan atau diganti sesuatu yang lain. Perbedaan inilah yang menjadi kabur di masa kini dengan adanya prinsip ekonomi liberal sehingga manusia pun dianggap sebagai komoditas.

Paradigma pendidikan berkaitan erat mengenai bagaimana manusia itu diakui. Memandang sosok manusia hanya dalam bentuk harga akan menumbuhkan suburkan prinsip individualitas yang kemudian membuat pendidikan hanya berorientasi prestasi, nilai, atau semua bentuk indikator penilaian kognitif. *Human Capital* atau modal manusia dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan individu menjadi fokus yang terpenting selain *money capital*, karena pada akhirnya *human capital* ini dapat dikonversi ke dalam bentuk materi. Prinsip individualisme ini pada akhirnya akan lebih cenderung menghasilkan suasana kompetisi ketimbang kolaborasi.

Penindasan (terhadap) Pendidikan

Sejak revolusi industri, benih-benih globalisasi mulai muncul dan tumbuh subur seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang saat ini sudah

mencapai kecepatan perkembangan yang menakutkan. Globalisasi mengaburkan batas-batas fisik maupun nonfisik antar negara sehingga membuat

kita bertransformasi menuju masyarakat dunia ketimbang masyarakat nasional. Hal ini menghasilkan bentuk persaingan baru antar bangsa yang diakibatkan pergeseran paradigma sebagai dampak dari globalisasi. Pergeseran ini disebutkan oleh Kuntowijoyo merupakan peralihan dari paradigma keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif.

Pada prosesnya, globalisasi kemudian menciptakan suasana kompetisi yang sangat tinggi. Dengan menghadapi persaingan global yang tidak pernah berhenti, apalagi mengetahui kemajuan-kemajuan yang ada di negara lain, pendidikan pada akhirnya mengalami dampaknya sebagai yang berperan dalam pembentukan manusia. Ketika kebanggaan sumber daya alam sebagai bentuk komparasi tidak lagi menjadi keunggulan dengan adanya pergeseran paradigma, kualitas sumber daya manusia kemudian menjadi fokus utama persaingan sebagai bentuk kompetisinya. Kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan individu terus berusaha ditempa dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi. Hal ini secara tidak langsung berujung pada kacamata materialisme yang memandang manusia berdasarkan "harga", yang dapat dinilai dan dibanding-bandingkan satu dengan lain untuk dapat dikonversi menjadi potensi materi. Paham materialistik yang hanya memandang manusia sebagai alat kerja tidak menghormatinya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini yang disebut Paulo

Freire dalam "Pendidikan Kaum Tertindas" sebagai pendidikan 'gaya bank', yang mana murid bagaikan gelas kosong yang diisi air belaka, menilainya dalam bentuk 'harga', bukannya 'martabat'.

Individualisme dan materialisme akhirnya menjadi tumbuh lambat laun dengan adanya perubahan kacamata pandang ini. *Human Capital* dalam bentuk keahlian dan intelektualitas menjadi perhatian utama. Dampak utama dari kompetisi ini adalah terciptanya seleksi 'hukum alam', yang mana yang kuat adalah yang dapat bertahan, yang lebih terampil dan berpengetahuan adalah yang dapat berdiri dalam badai globalisasi. Seleksi alam ini pada akhirnya tidak memberikan banyak pilihan pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk tertatih-tatih mengikuti arus yang ada. Walau itu berarti menggerus dan beralih dari cita-cita utama, yang penting adalah dapat mengejar ketertinggalan. Sederhananya, jika tidak dapat bersaing, kita akan kalah. Prinsip ini terus berkembang hingga akhirnya mengakar menjadi pandangan umum masyarakat terhadap pendidikan.

Memang, pada akhirnya meski dalam jumlah kecil, secara individual siswa Indonesia ternyata mampu meraih beragam prestasi yang dapat dikatakan membanggakan dalam berbagai kompetisi dan perlombaan tingkat dunia. Berkali-kali siswa Indonesia dapat meraih medali dan kemenangan seperti medali emas yang didapatkan

dari dua karya invensi remaja Indonesia dalam ajang International Exhibition for Young Inventors (IEYI) Ke-12 yang diselenggarakan pada 28-30 Juni 2012 di Bangkok International Trade and Exhibition Center, Thailand, atau kemenangan 1 medali emas, 1 medali perak, dan 4 medali perunggu dalam "International Mathematical Olympiad (IMO)" ke-54 yang berlangsung di Kota Santa Marta, Kolombia, pada tanggal 18-28 Juli 2013, serta masih banyak torehan presatasi anak bangsa lainnya yang mononjol secara individu. Tapi apakah hanya itu tujuan utama pendidikan?

Dengan semua serangan globalisasi yang semakin tidak mungkin lagi dibendung ini, pendidikan menjadi korban utamanya. Indonesia mau tidak mau tertuntut untuk turut serta dalam persaingan ini apabila tidak ingin tertinggal. Pendidikan beralih fungsi sebagai pencipta tenaga kerja, pencipta pencipta medali dan piala. Suasana dan paradigma yang ditanamkan ke dalam peserta didik pun lebih terfokus pada kompetisi prestasi dan nilai. Ketika pendidikan akhirnya dibatasi dalam pilihan-pilihan yang terbatas, pendidikan itu sendiri akhirnya tidak memiliki kebebasan penuh untuk dapat menjadi benteng utama, *guardian of value* kepribadian bangsa. Keterbatasan ini membuat pendidikan seakan tertindas dengan ketidakmampuannya untuk menjalankan tugas luhurnya secara bebas dengan baik.

Menelisik sedikit fungsi pendidikan, dalam UU sisdiknas

disebutkan "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa." Dalam hal ini terkelompok dua fungsi besar pendidikan, yakni mengembangkan kemampuan bangsa, dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, yang terangkum dalam satu tujuan besar yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini pun jelas tertulis bahwa yang menjadi fokus di sini adalah manusia dalam martabatnya (*dignity*), bukan harganya (*price*) yang selama ini menjadi perhatian utama dalam bentuk nilai dan prestasi. Menjadi manusia baik adalah prioritas ketimbang menjadi manusia pintar. Walau akhirnya itu hanya menjadi sekedar idealisme semu, harapan palsu, dengan adanya kontradiksi dengan pandangan masyarakat awam yang memandang "tidak cukup untuk menjadi baik bila ingin hidup".

Globalisasi telah menjadi penindas tidak langsung terhadap pendidikan negara-negara berkembang. Berbagai negara, terutama Indonesia, seakan tidak memiliki pilihan lain selain mau tidak mau mengikuti semua perkembangan yang ada, tidak percaya diri terhadap potensi sendiri dan terlalu banyak memandang ke luar. Kepercayaan dan idealisme Indonesia terhadap pengembangan kepribadian sebagai senjata utama bangsa ini hanya terakhir terdengar puluhan tahun yang lalu dari bapak revolusi kita, Ir. Soekarno. Tidak

masalah tertinggal tapi berdiri dengan kaki sendiri daripada berkembang tapi tidak menjadi diri sendiri. Hal ini yang dijelaskan oleh Keer Bertens dalam bukunya "Etika" sebagai bentuk kebebasan eksistensial, yang mana sesuatu itu bebas bila terlepas dari inotentisitas dan keterasingan. Bertens memang menyebutkan bahwa kebebasan eksistensial memang lebih sulit tercapai di masa kini yang mana dunia sedang berkembang dalam

bentuk *mass culture*, suatu kebudayaan massa, yang merupakan dampak dari globalisasi. Konsumsi adalah konsumsi massa. Otentisitas dan kemandirian semakin sulit untuk diwujudkan. Pada akhirnya kita hanya menjadi pengikut, tenggelam dalam massa dan arus global, terasing dengan keberibadian bangsa sendiri, tidak memiliki jati diri, dan tertindas dalam bentuk pendidikan individualistik.

Penindasan (oleh) Pendidikan

Sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang tak dapat dibendung, Indonesia sebagai negara berkembang secara lambat laun membentuk perspektif pembangunan bangsa yang berpijak pada *human capital*, karena sangat jelas bahwa pembangunan sumberdaya manusia dalam perspektif pembangunan ekonomi telah diakui sebagai salah satu bentuk investasi yang paing berpengaruh terhadap pertumbuhan produktivitas suatu bangsa. Pijakan ini kemudian berpengaruh besar pada sektor-sektor lainnya, termasuk pendidikan sebagai pembentuk sumberdaya manusia itu sendiri. Pijakan yang terpakai dalam perkembangan pendidikan di Indonesia pada akhirnya cenderung terlalu mengeksplorasi manusia dalam bentuk nilai-nilai dan standar, sehingga mengabaikan hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat

Perspektif pendidikan yang tefokus pada pembangunan ekonomi ini

menimbulkan paradigma umum masyarakat yang melenceng dari fungsi utama pendidikan. Yang berkembang di masyarakat akhirnya adalah pandangan bahwa salah satu tujuan seseorang menempuh jenjang pendidikan adalah agar memiliki keterampilan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya dalam aspek ekonomi. Seseorang yang terdidik memiliki jalan yang lebih terbuka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan semua keterampilan dan ilmu yang didapatnya selama proses pendidikan menjadi sebuah "harga" yang dapat ditukarkan dengan kebutuhan lain. Pendidikan bukan lagi dipandang untuk menaikkan derajat seorang manusia dari segi norma dan moral, tapi sekedar dari intelektualitas.

Hal ini melahirkan situasi kompetitif yang berlebihan sehingga menimbulkan efek 'seleksi alam' dalam perkembangan manusia. Seleksi ini pun bertingkat-tingkat dari awal bagaimana

seseorang dapat berpartisipasi dalam proses pendidikan hingga bagaimana ia dapat memanfaatkan hasil dari pendidikannya tersebut. Manusia, lebih tepatnya setiap manusia, yang seharusnya merupakan fokus utama pendidikan tertindas dalam bentuk seleksi-seleksi yang tercipta sebagai hasil dari pendidikan yang berprinsip kompetitif-individual.

Selama ini kondisi pendidikan di Indonesia berada pada hal yang kita kenal dengan 'lingkaran setan', siklus tiada henti yang menjebak seseorang dalam suatu keadaan. Untuk dapat memperoleh pendidikan, seseorang membutuhkan biaya dan waktu yang lebih, agar pada akhirnya hasil dari proses pendidikan itu adalah untuk mendapatkan biaya dan waktu yang lebih. Apabila seseorang berada di bawah batas biaya dan waktu yang dibutuhkan ia tidak dapat menempuh pendidikan secara normal untuk dapat mendapatkan biaya tambahan. Hal ini akhirnya menjadi perenggang kesenjangan sosial terbesar, yang pintar semakin pintar dan sebaliknya, yang kaya semakin kaya dan sebaliknya. Seleksi dalam bentuk biaya ini sebenarnya bukanlah suatu masalah yang menjadi paradoks, karena sudah jelas bahwa setiap warga negara di Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Adalah tugas pemerintah untuk dapat memenuhinya dengan baik, namun apakah itu masalah sebenarnya?

Di telisik lebih lanjut, seleksi ini meningkat dengan tingginya tingkat

pendidikan dan akan semakin terlihat pada perguruan tinggi, yang merupakan pabrik akhir proses pendidikan. Wajar apabila memang pada pendidikan dasar-menengah, tingkat pendidikan akan semakin mempertinggi pula ketegangan seleksi yang terjadi. Jumlah yang dapat bersekolah hingga SMA akan lebih rendah daripada yang dapat bersekolah SMP, begitu pula yang SMP lebih rendah ketimbang yang SD. Tapi melihat lingkaran yang ada, apakah yang lulusan SMP dengan lulusan SD memiliki perbedaan signifikan dalam hal probabilitas mencari biaya hidup? Yang terjadi adalah setiap jenjang pendidikan dasar-menengah tidak memiliki perbedaan yang berarti jika dilihat dalam perspektif pendidikan yang memandang manusia dalam bentuk keterampilan dan intelektualitas.

SD-SMP-SMA adalah satu paket proses sedemikian sehingga menempuh sebagiannya saja hampir tidak ada bedanya dengan tidak mengikuti sama sekali. Di dalam satu paket itu sendiri pun ada seleksi kualitas dalam bentuk kompetisi yang tidak dapat kita pandang sebelah mata. Banyak siswa-siswa yang memang benar-benar menonjol dalam hal akademik sehingga memperlihatkan prestasi yang membanggakan bahkan hingga skala internasional. Namun demikian, prestasi ini belum dapat dibanggakan karena hanya diperoleh sebagian kecil siswa yang dilatih khusus oleh guru yang terlatih pula. Pada kenyataannya, mayoritas siswa Indonesia memiliki prestasi yang relatif rendah ketimbang

negara-negara lain. Bahkan, akibat dari sistem kompetisi seperti ini, semakin terlihat lebih banyak siswa-siswa dari sekolah 'papan bawah' yang belum mendapat perhatian. Sistem kompetisi hanya menguntungkan siswa-siswa 'papan atas' yang mendapat perhatian dari guru-guru berkualitas. Sistem ini merupakan hasil dari pengembangan siswa berdasarkan *human capital* yang semakin memperkuat individualisme dan ketidakadilan.

Tugas pemerintah dalam hal membuat semua orang dapat bersekolah dasar-menengah sebenarnya bukan sebuah tantangan yang di luar jangkauan, tapi apakah artinya jika semua itu hanya mengejar kuantitas manusia yang bersekolah dalam bentuk formalitas keberhasilan pembangunan? Memandang manusia tidak sebagai manusia akan membuat seleksi ini semakin menggerus fungsi pendidikan yang seharusnya terfokus pada *dignity*. Seseorang dapat bersekolah SD hingga SMA mungkin adalah hal yang cukup bagus, tapi yang terpenting adalah telah menjadi apa orang tersebut setelah menempuh pendidikan tersebut? Lebih buruknya lagi, kemungkinan mayoritas lulusan SMA tidak mengerti sepenuhnya manfaat dari kebanyakan materi pendidikan yang diajarkan di sekolah. Karena apa? Karena sekali lagi, fokus pendidikan dalam efek globalisasi saat ini adalah untuk menciptakan tenaga kerja, apabila tidak diteruskan ke perguruan tinggi, semua ilmu itu seakan menguap begitu saja, mengendap dalam memori, terkecuali SMK yang memang

telah dilatih hingga ke peneraan ilmu itu sendiri. Walaupun begitu, prinsip kurikulum SMK tidak menjawab masalah melencengnya tujuan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia.

Pada tahap berikutnya, yakni pendidikan tinggi, seleksi yang sebenarnya baru terjadi. Pendidikan tinggi adalah pintu terakhir keluarnya hasil proses pendidikan yang utuh, yang telah sempurna menempuh setiap tahap dan lolos dari berbagai seleksi yang menindas. Bahkan, seseorang baru dapat dikatakan terdidik (*educated man*), apabila telah minimal menempuh pendidikan tinggi. Di sini peserta didiknya memiliki identitas baru yang memiliki sejarah harum sebagai garda terdepan perubahan. Identitas, yang kita kenal sebagai intelektual ini yang selanjutnya memberikan beban besar di pundak masing-masing peserta didik sebagai mereka 'yang terpilih' dari proses kompetisi yang tercipta.

Kaum intelektual, yang melekat pada nama lain, mahasiswa, mungkin tidak sekedar nama yang mungkin terdengar biasa saja pada kebanyakan telinga. Mereka mengalami kematangan ilmu yang dikembangkan dalam budaya akademik yang tersistemasi dalam tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Dari tiga dharma tersebut dapat kita pahami betapa besarnya beban seseorang yang terdidik. Di sini dapat terlihat sesuatu yang lebih dalam mengenai pendidikan, yaitu bahwa

tujuan pendidikan bukanlah semata-mata untuk mengembangkan kemampuan intelektual, lebih dari itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup peserta didik maupun masyarakatnya. Selain itu, peranan pendidikan bukan hanya sekedar penerima nilai-nilai budaya tetapi juga sebagai unsur pengembang kebudayaan artinya pendidikan sebagai suatu proses kehidupan yaitu untuk menolong diri sendiri dan meningkatkan martabat masyarakatnya. Pendidikan memang tidak dapat dilepaskan dari martabat manusia, yang dalam bentuk kolektif tersusun dalam bentuk budaya.

Sayangnya, bentuk ideal selalu sangat berbeda ketimbang realita. Sebagai akibat susana kompetisi yang terbentuk sejak sekolah dasar, mental bersaing yang tertanam dalam peserta didik pun bersifat individualistik dan *self-centered*, terlebih ketika setiap perkembangannya keunggulan selalu dikaitkan dengan *human capital*. Mental individual ini yang secara terpadu dipupuk sedikit demi sedikit selama sekolah dasar-menengah akhirnya mengikis tanggung jawab moral dalam kepribadian setiap peserta didik. Kalaupun pada masa pendidikan tinggi terselip sedikit mengenai idealisme-idealisme retorik mengenai mahasiswa sebagai agen perubahan dan lain sebagainya, ataupun diberikan pemahaman mengenai tridharma perguruan tinggi dan *tetekbengek*-nya, semua hanya seakan melukis di atas air, karena kepribadian manusia telah terpatriti ketika ia mengalami sekolah

dasar-menengah. Paradigma pendidikan berorientasi pembangunan hanya akan menghasilkan mental-mental pekerja, bukan pengabdian, mental peniru, bukan pengembang, mental individu, bukan sosial. Hal ini yang akhirnya membuat pendidikan tinggi hanya sebagai penyempurna para pekerja, yang berikutnya ketika lulus entah kemana.

Ketika kita bertanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap yang tidak terdidik? Tentu saja mereka yang terdidik! Sehingga dalam konsep makronya, seharusnya mereka yang berhasil lolos seleksi alam yang terjadi dalam sebuah perjuangan panjang akan kembali untuk membantu mereka yang tidak mampu lolos. Anak-anak yang tidak terdidik di Republik ini adalah "dosa" setiap orang terdidik yang dimiliki di Republik ini. Tapi apakah guna berbicara yang ideal apabila paradigma masih melenceng dari esensi, ketiadaan tanggung jawab moral yang semestinya ditanamkan selama menempuh pendidikan dasar-menengah membuat pendidikan menjadi produsen penindas itu sendiri. Intelektualitas adalah suatu hal yang membebaskan orang menjadi manusia seutuhnya dengan akal pikiran yang mandiri. Mereka yang intelek artinya adalah yang sadar sepenuhnya akan siapa dia dan apa yang harus dia lakukan. Kesadaran dan kebebasan inilah yang menjadi inti utama pendidikan ketika diterapkan pada kaum-kaum tertindas seperti yang coba dikaji oleh Freire. Namun ketika kaum intelektual itu sendiri memanfaatkan kesadaran dan

kebebasannya tanpa disadari dengan tanggung jawab dan etika moral, kaum intelektual sama saja mengambil kebebasan itu dari yang seharusnya hak setiap manusia dalam hidup. Mereka yang dapat menjadi sarjana hanya menjadi budak-budak korporasi ataupun penjahat-penjahat birokrasi di pemerintahan atau mungkin hanya jadi sekedar manusia biasa yang hanya bisa bereaksi atau apatis terhadap bangsanya sendiri. Lalu apa bedanya, kaum intelektual dengan penindas itu sendiri?

Pada dasarnya, seleksi yang terjadi menghasilkan dua kutub manusia yang berbeda, mereka yang tidak mampu menyelesaikan seleksi dengan menempuh pendidikan secara sempurna hingga pendidikan tinggi terjebak dalam lingkaran yang membuatnya selalu berada dalam keadaan tidak mampu untuk mengubah taraf hidupnya. Mereka kehilangan kesukarelaan dalam bertindak karena adanya keharusan bekerja dari kecil ataupun ketidakmampuan meraih akses

pendidikan. Hal ini yang digolongkan lagi oleh Bertens sebagai kebebasan moral, yaitu kebebasan yang terlepas dari paksaan moral atau ketidaksukarelaan dalam melakukan sesuatu dalam hidupnya. Sedangkan untuk mereka yang berhasil lolos dan menjadi intelektual sepenuhnya akan terkekang zaman dan terbawa arus, membawanya secara tidak sadar menuju pengasingan jati diri, mengikuti mode, dan akhirnya merenggut kebebasan eksistensialnya.

Terenggutnya kebebasan eksistensial mereka yang lolos ini membuat mereka kehilangan kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap bangsanya sendiri, menjadi individualistik dan *ignorant* sehingga berbalik menjadi penindas mereka yang tertindas kebebasan moralnya. Menjadi ironi memang ketika pendidikan yang gagal melaksanakan esensinya akhirnya membentuk penindas itu sendiri, atau dengan kata lain penindasan yang terjadi dilakukan oleh pendidikan itu sendiri.

Social Capital

Perspektif manusia terhadap konsep *capital* atau modal bermula dengan terfokus pada materi atau sumberdaya fisik seperti SDA, faktor produksi, ataupun *money capital*. Hal ini yang kemudian menumbuhkan persaingan komparatif antar negara yang semakin berusaha mengembangkan tiap sektor materinya yang dirasa dapat menjadi keunggulan negara tersebut. Setelah terjadinya

revolusi teknologi informasi dan berkembangnya globalisasi, timbul peralihan dari persaingan komparatif menjadi persaingan kompetitif yang lebih terfokus pada sumber daya manusia karena dapat dikembangkan oleh negara manapun tanpa harus terbatas pada keunggulan-keunggulan fisik. Perspektif manusia terhadap modal pun teralih pada sumberdaya manusia atau *human capital*, yang

ditandai dengan intelektualitas dan profesionalitas. Padahal dapat kita pahami bersama bahwa hal ini cenderung mengarah pada individualisme yang berlebihan sehingga akan berdampak pada malapetaka kolektif. Suyata, dalam paper yang beliau sajikan dalam seminar Resolusi Kebijakan Pendidikan Nasional, menyebutkan, "Kita dapat mengamati dari konflik yang sering terjadi di semua tingkatan dan kehidupan, korupsi tetap meluas, lunturnya semangat pengabdian, maraknya egoisme berlebihan, rendahnya *sense of crisis*, kebodohan politik, dan sebagainya."

Jelas sebelumnya menjelaskan bahwa hakikat manusia tidak sekedar sebagai makhluk individu, namun juga sebagai makhluk sosial. Eksplorasi berlebihan pada individu mengabaikan hakikat manusia dalam bentuk kolektif. Dalam diri manusia, selain memiliki kemampuan dan keterampilan individu, sebenarnya terdapat juga potensi-potensi sumberdaya atau modal yang perlu menjadi perhatian utama namun selama ini dikesampingkan, yaitu modal yang lahir dan berkembang melalui pendidikan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Modal ini dikenal dengan modal sosial (*social capital*) atau dalam bentuk modal budaya (*cultural capital*).

James Coleman, seorang sosiolog yang mempopulerkan istilah modal sosial mendefinisikannya sebagai sumber bermanfaat yang tersedia bagi aktor

melalui hubungan sosialnya. Dalam hal ini, tampak bahwa modal sosial membutuhkan adanya kerjasama antar individu untuk memunculkan kemampuan-kemampuan yang terbatas modal-modal lainnya. Modal sosial akan memudahkan pencapaian tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya atau dapat dicapai hanya dengan biaya yang lebih besar. Hal ini ditandai dengan adanya relasi sosial yang terpelihara, jaringan kerjasama yang sinergis, kepatuhan terhadap budaya dan norma yang berlaku, dan komunikasi yang berkelanjutan. Tentu saja keberadaan modal ini berpotensi menghancurkan tembok-tembok kaku yang selama ini mengekang paradigma negara-negara berkembang yang terbatas oleh *human capital* ataupun *money capital*.

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan dalam hal nilai dan norma luhur yang tersebar dalam budaya-budaya yang beragam di tiap daerahnya. Keragaman budaya menjadikan suatu kesamaan penting yang menyatukan satu Indonesia dalam satu ideologi kerakyatan. Prinsip inilah yang menjadikan pendidikan sebagai aspek penting untuk dsadari sebagai ujung tombak berkembangnya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang seutuhnya. Ini yang menjadikan paradigma pendidikan di Indonesia seharusnya cukup berbeda ketimbang paradigma pendidikan yang berlaku umum di beberapa negara maju yang hanya memusatkan prinsip individualisme yang hanya memandang

potensi sebatas individu. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tugas lembaga pendidikan tidak sesederhana membuat orang menjadi pintar dan berpengetahuan, tetapi harus menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam kehidupannya agar kelak menjadi manusia yang memiliki kepribadian, beradab, dan bersusila. Dalam salah satu pidatonya pada tahun 1949, Ki Hajar Pendidikan menyatakan, "pendidikan dan pengajaran adalah usaha kebudayaan semata-mata, bahwa perguruan itu adalah taman persemaian benih-benih kebudayaan bagi suatu bangsa". Sehingga di sini penjiwaan kebudayaan dalam bentuk wawasan kebangsaan dan penanaman budi pekerti adalah hal yang harus menjadi prioritas dalam proses pendidikan di Indonesia.

Dalam tugas luhurnya, sangat jelas bahwa pendidikan seharusnya bersandarkan pada modal sosial yang sangat berpotensi ditumbuhkan di masyarakat Indonesia. Kekentalan budaya dan nilai-nilai luhur gotong royong yang masih melekat dalam jiwa bangsa Indonesia menjadikan modal sosial dapat menjadi senjata utama pengembangan sumberdaya selain modal individu maupun modal materi. Pendidikan yang ideal memang seharusnya mempertimbangkan perspektif sosial dalam menjalankan pengembangan manusia yang baik. Bahkan pendidikan pun sebenarnya tidak secara sempit dipandang dalam bentuk pendidikan formal melalui sekolah. Menurut Ki Hajar, proses pendidikan bagi manusia berlangsung

dalam tiga lembaga yang disebutnya sebagai tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya secara bertahap dan terpadu mengamban tanggung jawab pendidikan dan merupakan komponen utama pendidikan manusia sepanjang kehidupannya.

Kajian mengenai modal sosial bukanlah hal yang singkat untuk dibahas dan karena itu tidak akan dijelaskan mendalam di tulisan ini. Namun dari penjelasan singkat sebelumnya terlihat bahwa ketika modal sosial, yang potensial dimiliki Indonesia, dapat dioptimalkan dengan baik dan dijadikan perspektif utama dalam menjalankan proses pendidikan, batasan-batasan biaya ataupun waktu yang selama ini menjadi probelmatika klasik tiada henti di negara berkembang tidak lagi menjadi hambatan. Bahkan modal sosial memiliki berbagai kelebihan tersendiri yang tidak dapat diraih dengan modal lain seperti adanya dinamika refleksi yang saling memperbaiki dalam suatu ikatan sosial. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Ikhsan, dalam disertasinya mengenai pengaruh modal sosial dalam pengembangan profesionalisme guru, bahwa pendekatan baru dalam perencanaan harus didukung oleh praktik reflektif guru lain yang juga telah mempelajarinya karena praktik reflektif ini kemudian dipahami sebagai suatu aktivitas sosial sebagaimana aktivitas individual guru.

Modal sosial menekankan aspek kolaborasi ketimbang kompetisi. Kolaborasi dihasilkan dengan adanya komunikasi dan dialog yang terjadi terus menerus. Hal ini menjadi perhatian Freire seperti yang ia jelaskan bahwa dialog merupakan hal penting dalam pendidikan kaum tertindas. Ia menulis: "Jika dalam mengucapkan kata-katanya sendiri manusia dapat mengubah dunia

dengan jalan menamainya, maka dialog menegaskan dirinya sebagai sarana di mana seseorang memperoleh makna sebagai manusia." Dengan adanya kolaborasi, suasana kerjasama akan lebih terbentuk ketimbang suasana kompetitif dan selektif. Pengembangan manusia akan berdampak luas dan martabat manusia akan kembali lebih mendapat perhatian ketimbang "harga" manusia.

Etika Masa Depan

Dari semua penjelasan dan kajian di atas, terlihat bagaimana pendidikan menjadi korban penindasan globalisasi ketika negara-negara berkembang terbawa arus dan mengalami pengasingan diri terhadap kebebasan eksistensial yang dimiliki untuk menjalankan cita-cita utamanya. Ketika pendidikan menjadi korban, ia secara tidak sadar pun akhirnya menciptakan paradigma dan sistem yang menghasilkan penindas-penindas baru dalam bentuk intelektualitas yang tidak memiliki tanggung jawab moral ataupun cenderung berpaham individualistik. Hal ini menciptakan rantai raksasa 'lingkaran setan' yang sebenarnya. Bermula dari globalisasi hingga berdampak pada nasib masa depan anak-anak bangsa.

Meminjam istilah dari Daoed Joesoef, pendidikan pada prinsipnya memikul amanah "etika masa depan", yang di sini berarti bahwa setiap manusia saat ini memikul tanggung jawab besar atas semua konsekuensi dari

tiap perbuatannya saat ini terhadap apa yang akan terjadi berikutnya di masa depan. Hal ini membuat kerangka paradigma terhadap pendidikan haruslah jangka panjang, memandang bagaimana bentuk suatu bangsa beberapa tahun ke depan. Apa yang akan terjadi di masa depan berada di tangan manusia-manusia yang akan menjalankannya, dan bagaimana agar manusia-manusia tersebut dapat menjadi manusia seutuhnya dengan hakikat yang seharusnya merupakan tugas utama pendidikan.

Manusia lebih dari sekedar entitas yang dinilai dengan harga. Tiap individu adalah unik dan tidak dapat disetarakan oleh apapun. Bagaimana kita memandang manusia dengan tepat seperti ini berpengaruh besar pada bagaimana pendidikan itu dilaksanakan. Tak ada gunanya kita mengembangkan sektor lain dalam perlombaan yang tidak ada ujungnya bila sebagai bangsa kita kehilangan jati diri dan terasingkan dari kebebasan eksistensial kita sebagai

akibat dari pendidikan yang berbasis pembangunan. Sejak bangkitnya orde baru, kebebasan ini telah mulai direnggut sedikit demi sedikit dan membuat Indonesia tertindas dengan cara yang baru, apa yang sekarang dikenal dengan neokolonialisme.

Dengan globalisasi telah membuat dunia berputar dalam siklus yang tidak pernah berhenti, masyarakat semakin terbawa dalam dinamika yang semakin tidak menentu. Perubahan dan transformasi sosial sebagai peristiwa yang memang tidak bisa dielakkan bergerak dalam laju yang semakin cepat. Salah satu peran pendidikan, dengan melakukan inovasi-inovasi sosial, seharusnya yang dapat menjadi pendorong dan pengarah perubahan sosial yang terjadi. Namun pada kenyataannya, dengan bergesernya paradigma pendidikan, yang justru lahir adalah paradoks. Perubahan sosial yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan globalisasi yang tak dapat dibendung berjalan jauh lebih cepat dibandingkan upaya pembaruan dan laju perubahan pendidikan. Pendidikan yang seharusnya menjadi agen perubahan akhirnya tidak mampu mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi secara akurat. Hal ini cukup ironis karena jelas ketidakmampuan mengelola dan mengikuti dinamika perubahan sosial sama artinya dengan menyiapkan keterbelakangan. Entah apa yang akan terjadi di masa depan apabila kesenjangan antara laju perubahan sosial dengan pembaruan pendidikan masih

terentang jauh. Dengan demikian, apakah semua etika masa depan yang diemban pendidikan dapat dilaksanakan dengan paradigma pendidikan yang masih terpaku pada *human capital* dalam rantai penindasan yang dilematik?

Pendidikan bukanlah hal yang dapat dipandang sebelah mata dalam pengembangan suatu bangsa. Tidak masalah apabila kesejahteraan ekonomi, percepatan pembangunan, dan berbagai kebijakan lainnya menjadi hal yang juga menjadi perhatian, namun jangan sampai semua itu mempengaruhi bagaimana kita seharusnya memandang pendidikan. Menjadi saya sadari bahwa *guardian of value, agent of change*, dan *ironstock*, sebenarnya adalah peran utama pendidikan. Ia adalah tembok pertahanan kepribadian bangsa, yang dapat menyelamatkan jati diri bangsa ini dari kikisan zaman. Ketika pendidikan tidak dapat melaksanakan tugas itu dengan baik pada masa orde baru, mahasiswa mengambil alih semua peran itu sebagai harapan terakhir bangsa yang masih sadar akan tujuan bangsa.

Memang, ketika seluruh rakyat tertindas dalam keterbatasan yang berlebihan, hanya pikiran bebas yang dapat melawannya, dan hal itu hanya dimiliki oleh seorang intelektual. Sangat disayangkan apabila seperti yang saya jelaskan di atas, bila kaum intelektual, sebagai harapan terakhir bangsa terjebak dalam bentuk penindasan yang lebih besar lagi, dalam bentuk individualisme dan materialisme, yang merenggut

kesadaran moral dan sosial hingga akhirnya berujung pada padamnya semangat kebangsaan yang sejak dulu selalu dibakar oleh bapak revolusi kita.

Apakah 10 pemuda Indonesia saat ini masih dapat mengguncang dunia? Tanyakan pada diri masing-masing.

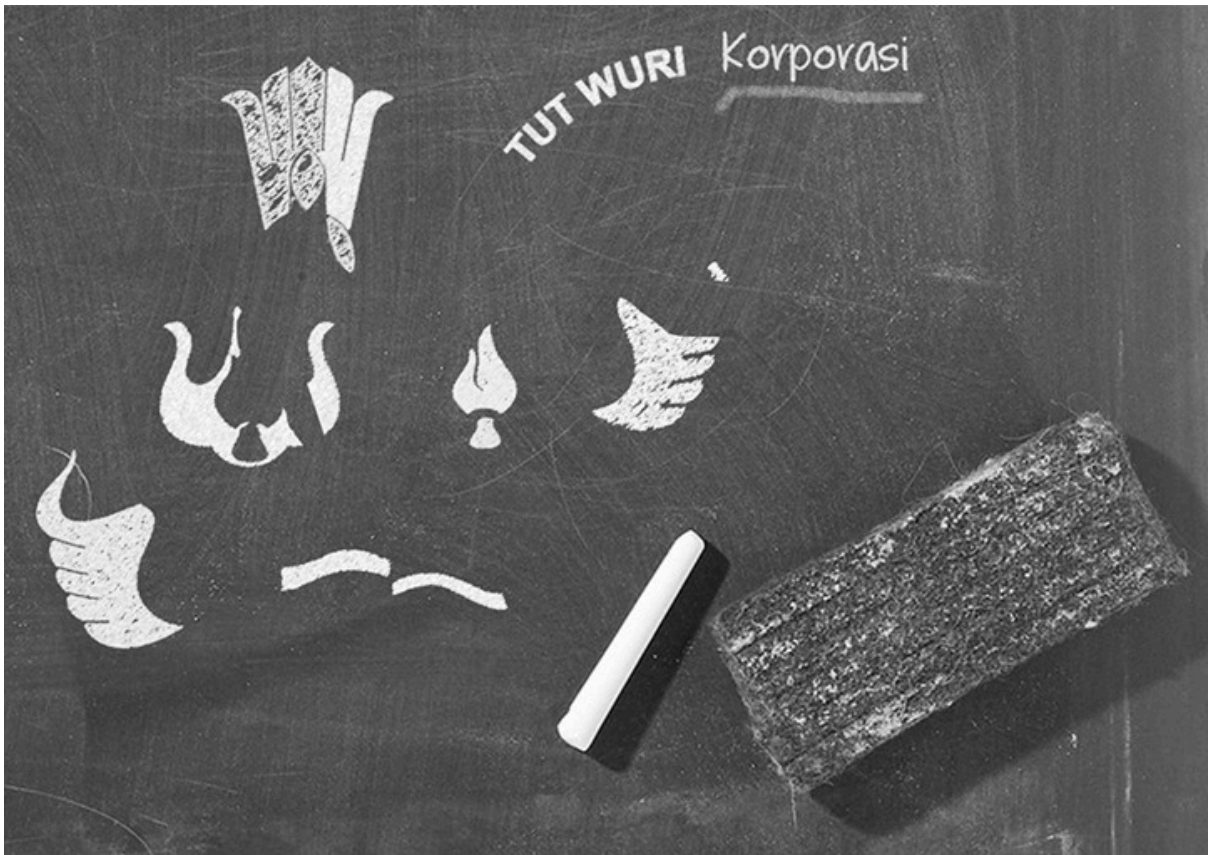
Salam pembebasan.

"Ing Ngarso Sung Tuladha

Ing Madya Mangun Karsa

Tut Wuri Handayani"

(PHX)



Penindasan Pendidikan 2

Sudah bukan hal yang asing lagi bagi siapapun, terutama kaum intelektual, bahwa pendidikan merupakan kunci utama transformasi sosial, atau dalam istilah lain, pendidikan bisa dikatakan sebagai agent of change sistem sosial apapun. Tidak mungkin tidak, pendidikan secara umum adalah proses pembentukan manusia dalam sistem sosial itu sendiri, dan apapun manusia yang terbentuk akan sangat menentukan arah perubahan yang terjadi ke depan.

Tidak perlu saya ulas lagi pembahasan panjang mengenai pendidikan, namun sedikit saya bahas kembali sedikit, bahwa pendidikan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses memanusiasikan manusia.

Mungkin telah banyak pendapat yang keluar mengenai definisi pendidikan, namun secara umum semua dapat dimampatkan dalam suatu pemahaman ringkas bahwa pada dasarnya seseorang belajar atau mendidik diri adalah dalam rangka untuk memaksimalkan hidup sepenuhnya. Sehingga, proses pendidikan memang proses untuk hidup, yang dalam hal ini dengan menjadi manusia seutuhnya yang memiliki potensi dan keunikannya sendiri-sendiri. Dapat kita lihat bagaimana pada awalnya setiap orang mencari gurunya sendiri, berkelana dari satu tempat ke tempat lain dalam usaha untuk memuaskan hasrat dan keingintahuannya, hingga menjadi "terdidik" memang adalah sebuah hasrat kehidupan.

Pergeseran Makna

Pendidikan secara fundamental adalah suatu proses yang sangat mulia, bahkan begitu sakral dalam kehidupan manusia. Proses pendidikan sendiri sebenarnya adalah suatu proses yang wajar terjadi dan pasti terjadi secara alami seiring dengan berkembang dan tumbuhnya kesadaran dalam pikiran manusia. Dapat kita refleksikan pada beberapa peradaban kuno, yang mana anak-anak pada umur tertentu dibiarkan lepas untuk mencari jalan hidupnya sendiri, karena sesungguhnya tidak ada pembelajaran yang lebih baik selain dari diri sendiri. Seperti kata pepatah yang masih sangat berlaku hingga saat ini, "pengalaman adalah guru terbaik",

sebenarnya subjek dan objek pendidikan adalah sama, yaitu diri sendiri. Keberadaan orang lain, baik individu maupun dalam bentuk institusi, hanyalah pemberi petunjuk jalan, pendukung, dan pembimbing dalam proses pendidikan yang dijalani sendiri tiap manusia. Perspektif ini lah yang seharusnya menjadi perspektif utama pendidikan. Kecepatan dan arah perkembangan setiap manusia hanya bisa ditentukan yang bersangkutan. Siapapun tak pernah punya hak untuk menilai ataupun membandingkan bagaimana seseorang mendidik dirinya sendiri dalam perjuangannya untuk menjadi manusia

seutuhnya. Karena sesungguhnya perspektif ini secara implisit mempertegas keunikan tiap manusia. Tidak ada yang bisa mendefinisikan diri selain diri sendiri. Perkembangan manusia pun terjadi secara alami dan murni.

Sistem pendidikan berbasis subjek ini telah bertahan begitu lama dari pertama kali peradaban muncul. Bahkan ketika academia mulai dibangun oleh Plato pada masa Yunani sebagai sebuah tempat dimana orang-orang berkumpul dan belajar bersama pun, itu hanya menjadi sebuah wahana diskusi dan mengembangkan diri. Tidak ada doktrin atau hal khusus yang diajarkan, Plato hanya menunjukkan beberapa masalah untuk dipelajari dan diselesaikan oleh yang lain. Berbagai orang berkumpul disana untuk berdialektika dan belajar dengan caranya sendiri-sendiri. Sistem sekolah pada awal perkembangannya pun memakai perspektif serupa pada peradaban lain, seperti di China dan India, yang mana sekolah hanyalah wadah agar tiap murid bisa mengembangkan dirinya masing-masing.

Namun, seiring dengan berkembangnya peradaban, bermunculan kebutuhan untuk memusatkan pengajaran mengenai hal tertentu agar setiap anak memiliki pengetahuan yang sama. Sistem pemusatan ini berawal pada kekaisaran Bizantium dari dunia militer yang jelas memang

membutuhkan penyeragaman pemahaman dan doktrin pada setiap orang. Sistem sekolah yang seperti ini terus berkembang hingga Bizantium runtuh pada abad ke-15. Secara paralel, pengembangan sistem sekolah serupa muncul pada dunia islam pertama kali di Madinah dalam bentuk madrasah, yang pada awalnya hanya menjadi tempat pengajaran agama islam. Baru ketika memasuki kekhalifahan, ilmu-ilmu rasional lain seperti matematika dan astronomi mulai ikut diajarkan. Sistem pengajarannya sebenarnya tidak dapat dikatakan terpusat, namun hanya terarahkan agar tetap berada dalam koridor agama yang tepat. Di Eropa sendiri, sistem sekolah pertama kali muncul pada abad ke-12 untuk mengajarkan bahasa Latin. Meskipun dengan sebab dan tujuan yang berbeda-beda, semuanya menjadi cikal bakal berkembangnya sistem sekolah yang terpusat pada guru atau pengajaran, memisahkan antara subjek dan objek pendidikan.

Hal ini secara tidak langsung mentransformasi makna pendidikan sendiri menjadi lebih sempit. Pendidikan menjadi sekedar transfer ilmu dari yang lebih tahu kepada yang kurang. Sekolah pun berkembang menjadi sekedar formalisasi dari proses transfer ilmu ini, bukan sebagai tempat untuk menghabiskan waktu luang untuk mengembangkan diri, seperti makna dasarnya, skhole, yang berarti waktu luang. Usaha untuk mengembangkan diri pun tersempitkan menjadi cukup sekedar memasuki sekolah formal.

Mungkin memang pada awalnya bentukannya, sekolah tidak murni menjadi pusat “penyuapan” ilmu, seperti sistem madrasah pada masa kekhalifahan sendiri pun, guru hanya bertindak untuk menjaga koridor

pemahaman agar tidak melewati batas-batas agama. Basis pendidikan masih pada baca dan tulis mandiri. Namun sayangnya, semua benar-benar berubah ketika revolusi teknologi menyerang.

Kapitalisasi Manusia

Sebenarnya bagaimana ini bermula merupakan sesuatu yang bisa ditarik mundur terus, namun dapat diambil suatu titik balik peradaban yang menimbulkan transformasi begitu masif dalam seluruh kehidupan manusia. Titik balik itu adalah revolusi industri. Revolusi yang dimulai pada pertengahan abad ke 18 ini mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Bagaimana tidak, berbagai bentuk proses produksi mengalami efisiensi besar-besaran, mengakibatkan peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak sedikit. Apalagi yang paling bisa memengaruhi kehidupan manusia selain kebutuhan itu sendiri? Maka dengan revolusi yang ditandai dengan diciptakannya mesin uap ini, terjadi pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara di dunia pun meningkat dan terciptalah sistem ekonomi kapitalisme modern.

Apakah itu hal yang salah? Mungkin tidak. Karena apa yang salah dari sebuah kemajuan? Namun sayangnya, dampak dari revolusi

industri ini ternyata begitu besar di masa depan. Dengan bermunculannya teknologi-teknologi baru manufaktur yang sangat meningkatkan efisiensi produksi, kesenjangan antara pemilik modal dengan yang tidak menjadi sangat besar. Pemilik modal akan lebih punya kemampuan lebih untuk memiliki faktor produksi dan menciptakan keuntungan yang lebih besar lagi dengan produksi komoditas. Usaha-usaha kecil pun gulung tikar dan sektor-sektor kecil, terutama pertanian, mulai ditinggalkan karena terjadi urbanisasi besar-besaran yang disebabkan munculnya pusat-pusat keramaian baru di kota. Namun, peralihan faktor produksi dari manusia ke mesin jelas membuat jumlah tenaga kerja yang meledak akibat urbanisasi tidak dapat diimbangi dengan lapangan kerja yang semakin sedikit, upah tenaga kerja pun semakin minim dan jaminan sosial mereka pun semakin sulit.

Dampak utama yang cukup nyata dari perubahan ini adalah terciptanya perspektif bahwa perkembangan teknologi modern bisa sangat memakmurkan manusia, hingga akhirnya berujung pada orientasi pengembangan manusia yang beralih

menuju berbasis pengetahuan dan keterampilan. Menciptakan manusia yang hakiki adalah dengan membuat manusia itu berpengetahuan dan cukup terampil sehingga kelak dapat bekerja dengan layak dan bisa bersaing dalam dunia perindustrian. Perspektif seperti ini sangat menggeser paradigma pendidikan yang semakin berbasis pada kompetensi dan melupakan semua aspek lainnya dalam perkembangan manusia. Standarisasi pun terjadi dimana-mana. Nilai seorang manusia dikuantifikasi berdasarkan pengetahuan dan keterampilannya. Cukup dengan selembar ijazah bisa memberi cap bahwa seorang manusia layak pakai atau tidak. Manusia pun beralih menjadi setara dengan komoditas, punya harga dan punya daya jual. Maka dari itu bahkan dianggap bahwa revolusi industri adalah peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan sejak domestikasi hewan dan tumbuhan pada masa Neolitikum.

Revolusi ini sendiri sebenarnya hanyalah cikal bakal dari raksasa yang pada dua abad berikutnya tumbuh besar dan menciptakan era kemanusiaan yang baru. Raksasa ini bernama globalisasi. Perkembangan teknologi modern yang dimulai dari lahirnya mesin uap terjadi begitu pesat karena tuntutan dari kebutuhan manusia itu sendiri dan didorong dari kompetisi yang tercipta dari sistem ekonomi kapitalis. Apalagi dengan dikembangkannya sibernetika pertama kali pada masa dua perang dunia menciptakan revolusi lain yaitu revolusi informasi, yang mana batas-

batas melebur dan akhirnya lahir globalisasi sebagai bentuk penyatuan dunia dalam satu sistem sosial raksasa. Sayangnya, globalisasi lahir ketika masyarakat dunia mulai berpegang pada sistem ekonomi kapitalis yang sangat bernuansa kompetisi. Akhirnya, sistem sosial dunia yang terbentuk dari globalisasi pun menjadi suatu arena kompetisi raksasa. Ini yang saya jelaskan dalam tulisan saya yang pertama sebagai penindasan terhadap pendidikan negara-negara berkembang, yang mau tidak mau tertuntut untuk mengubah perspektif pendidikannya menjadi berbasis kompetensi demi dapat bersaing dalam arena pertarungan global.

Hal ini yang kemudian yang membuat sekolah menjadi benar-benar hanya formalisasi transfer ilmu dan kompetensi demi standarisasi manusia. Kurikulum yang diajarkan di sekolah hanya disesuaikan pada kebutuhan industri, yang secara tidak langsung "memaksa" murid, karena kebutuhan mencari ilmu bukan muncul dari murid tapi dimunculkan oleh sekolah dan tuntutan kompetisi. Pendidikan pun mengalami penyempitan makna besar-besaran. Di Indonesia sendiri, hal ini jelas secara nyata terlihat dengan adanya prinsip link and match antara pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri. Istilah kasarnya, pendidikan hanyalah pabrik tenaga kerja. Manusia hanya menjadi modal untuk diperjualbelikan dengan selembar ijazah, sebuah standarisasi yang mematikan potensi keunikan tiap manusia.

Kutukan Peradaban

Jelas semua yang terjadi pada perkembangan teknologi modern dari revolusi industri hingga saat ini memicu pengerdilan makna pendidikan menjadi jauh dari cita-cita luhurnya, yaitu memanusiation manusia. Namun jika kita bertanya pada apa yang sebenarnya mengakibatkan revolusi teknologi itu sendiri muncul, jawabannya akan sulit ditemukan selain bahwa itu memang bagian dari berkembangnya peradaban. Sudah menjadi kewajaran bila manusia memang selalu mencari kemudahan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kewajaran sederhana itu bersama keingintahuan lah yang memicu perkembangan manusia sejak berkembangnya akal. Ditemukannya kapak dan perkakas sederhana pada awal peradaban merupakan bentuk usaha manusia untuk mencari kemudahan.

Bahkan lebih dalam lagi, jika ditanya mengenai apa yang menjadi dasar berkembangnya teknologi, bisa dikatakan jawabannya adalah hasrat manusia itu sendiri, kemalasan-kemalasan yang ditransformasikan menjadi sebuah usaha untuk mengefektifkan usaha itu sendiri. Namun, disertai nilai estetika dan keingintahuan manusia yang besar terhadap segala sesuatu, kemalasan ini menjadi sebuah kreativitas, produk dari potensi kemanusiaan yang bisa muncul pada siapapun, yang mencerminkan keunikan tiap manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa produk dari

pendidikan adalah keunikan, karena ketika seseorang meraih kepercayaan penuh pada pengembangan dirinya sendiri, ia bisa berkembang secara alami menjadi manusia seutuhnya dan menciptakan jati diri yang kuat, suatu keunikan diri, yang pada masa kini sangat langka ditemukan sebagai akibat dari standarisasi dan penyempitan makna pendidikan.

Pada awalnya, berkembangnya peradaban pun berbasis hal-hal serupa. Yunani dikatakan beradab bukan dari ilmu dan teknologinya yang berkembang, namun dari karya-karyanya, baik dalam hal seni, bangunan, maupun pemikiran. Yang menjadi corak adalah bagaimana orang-orangnya berkembang dengan seluas-luasnya menjadi apapun, pengrajin, seniman, filsuf, dan lain-lain. Sebenarnya hal ini tidak hanya terjadi pada Yunani, peradaban serupa pun sama, yang menjadi corak adalah karya-karya manusianya yang beragam dan unik, mencerminkan pendidikan orang-orangnya. Karena tentu, dalam maknanya yang luas, terdidik adalah termanusiakan secara murni dan alami. Sistem pupil (murid yang mengabdikan pada seorang guru) pada masa kuno menjadi simbol betapa pendidikan sangat berbasis hasrat tiap subjek, karena murid lah yang mencari gurunya sendiri! Bukan saat ini yang mana anak-anak bersekolah tanpa hasrat apapun selain untuk lulus dan menyamakan standar pada kompetisi global.

Keunikan yang ada pada tiap individu dalam tataran kolektif disebut sebagai budaya, suatu ciri khas dari sekelompok manusia sebagai bentuk pendefinisian identitas mereka. Karena itulah, budaya merupakan hasil dari proses pendidikan, dan budaya lah yang sebenarnya menjadi cermin peradaban. Sehingga bisa dikatakan, peradaban adalah produk dari pendidikan. Namun dalam proses lanjutnya, peradaban sendiri, karena direfleksikan dari budaya, mendefinisikan kebutuhan masyarakatnya, menghasilkan tuntutan pada pendidikan, yang kemudian berlanjut lagi secara siklik membentuk peradaban, diiringi dengan faktor-faktor lain seperti perang atau munculnya penemuan besar.

Lalu dengan demikian, apa yang terjadi pada saat ini? Tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada abad pencerahan (paska renaissance) mengubah paradigma peradaban menjadi berbasis ilmu dan teknologi, apalagi dengan adanya revolusi industri seperti yang terjelaskan sebelumnya. Hal ini kemudian mendefinisikan ulang kebutuhan masyarakat ketika itu menjadi berorientasi pada pengetahuan dan keterampilan. Perubahan orientasi ini lah yang kemudian menghasilkan tuntutan pada pendidikan untuk mengubah paradigmanya menjadi berbasis kompetensi. Pergeseran paradigma ini yang kemudian secara siklik semakin memicu perkembangan teknologi dan semakin menciptakan peradaban yang berbasis ilmu dan teknologi. Sayangnya, pergeseran

paradigma ini memiliki efek samping, yaitu dengan pendidikan yang berbasis kompetensi, yang menjadi fokus utama hanyalah modal manusia (human capital) atau apa yang dimiliki individu, melupakan modal sosial (social capital) atau potensi yang dimiliki manusia secara kolektif. Dengan fokus utama terletak pada modal manusia, tercipta suasana kompetisi yang begitu kental sehingga memicu berkembangnya budaya individualistik yang akhirnya bersama globalisasi menjadi corak peradaban masa kini.

Jika dilihat mundur pun, tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada abad pencerahan dipicu dari kebebasan berekspresi yang menjadi corak peradaban renaissance yang merupakan simbol berhasil terbebasnya masyarakat dari gereja katolik pada era sebelumnya, yaitu abad pertengahan. Pada renaissance, sekolah-sekolah bebas berbasis seni dan sains mulai bermunculan sebagai bentuk bangkitnya lagi budaya setelah dikekang dogma. Munculnya sekolah-sekolah ini yang kemudian mendefinisikan ulang paradigma pendidikan yang akhirnya berujung pada abad pencerahan. Semua proses berkembangnya peradaban ini merupakan proses siklik yang alami antara pendidikan dan budaya, diiringi dengan faktor-faktor lain seperti jatuhnya Bizantium, Perang Salib, penemuan Galileo, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Apa yang terjadi hingga saat ini pun merupakan akibat dari proses alami peradaban yang dalam keberjalanannya membawa manusia

kepada era dimana kompetisi adalah corak utama.

Dengan demikian, peradaban pun menjadi suatu sebab yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Hingga akhirnya apapun keadaan pendidikan saat ini, semuanya merupakan bagian wajar dari berkembangnya peradaban. Tidaklah ada yang bisa disalahkan dari

paradigma pendidikan saat ini, karena ia merupakan hasil tuntutan dari kebutuhan masyarakatnya, yang terdefiniskan dari peradaban yang berkembang saat ini. Maka bagaikan kutukan, pendidikan berada dalam kondisi yang tertekan, tidak bisa berbuat apa-apa selain mencari cara mengubah sumber kutukan itu sendiri, yaitu peradaban.

Kembali ke akar rumput

Sebenarnya menjadi sebuah pesimisme bila kita menganalisis pendidikan saat ini terhadap sebabnya. Semua sistem yang ada saat ini tertindas oleh globalisasi, yang tidak memberikan pilihan lain selain mengikuti atau tertinggal. Sedangkan eksistensi globalisasi sendiri merupakan suatu bentuk kewajaran, konsekuensi logis dari berkembangnya peradaban saat ini. Mengubah pendidikan pun selalu menjadi simalakama, terutama bagi penentu kebijakan. Apa yang bisa kita lakukan ketika pendidikan sendiri under pressure oleh kondisi yang sesungguhnya suatu kewajaran? Pada akhirnya, pendidikan selalu tertatih-tatih mempertahankan maknanya di tengah tuntutan dari peradaban. Ketika pada suatu titik kelak pendidikan murni kehilangan maknanya, maka masih adakah yang dinamakan manusia seutuhnya? Mungkin masih, jika ada yang bisa membebaskan diri dari sistem dan paradigma yang menindas ini.

Setelah semua permasalahan yang jelas ada, mungkin sudah saatnya

berbicara solusi. Dialektika mengenai reformasi pendidikan, terutama di Indonesia sudah berulang kali terjadi, mulai dari tataran penentu kebijakan hingga praktisi akar rumput. Namun dalam perspektif peradaban yang sudah saya paparkan sebelumnya, terlalu idealis bagi saya bila reformasi ini bisa dilakukan pada sistem. Yang bermain dalam tataran sistem bukanlah satu atau dua sektor, melainkan keseluruhan aspek menjadi satu bagian yang tak terpisahkan. Karena memang perubahan peradaban tidak pernah sekedar mengubah sebagian, namun keseluruhan dari masyarakat yang terkait, yang sebenarnya semuanya berorientasi pada satu hal, yaitu budaya. Ketika berpikir untuk melakukan revolusi sistem pendidikan sendiri pun tidak akan pernah terlepas dari bagaimana tuntutan tenaga kerja, pengalokasian dana, penegakan hukum, perkembangan industri, dan berbagai hal lainnya yang tak terpisahkan. Apalagi ketika semua sudah berada dalam satu naungan peradaban, yang

jelas tak bisa diapa-apakan lagi selain dicoba sesuaikan.

Pendidikan dalam bentuk murninya sebenarnya merupakan suatu bentuk proses yang akan sangat sulit disistematiskan, dalam tataran sekolah sekalipun, apalagi dalam bentuk luas, seperti negara. Pendidikan selalu berkaitan dengan individu, karena pendidikan terkait dengan bagaimana manusia berkembang. Ketika proses pendidikan dilakukan secara kolektif, mau tak mau tercipta standarisasi yang akan membuat keunikan individu bisa terabaikan. Inilah yang saya lihat sebagai kesulitan utama melakukan reformasi pendidikan ketika sistem sosial sudah menjadi begitu kompleks, berbeda dengan pada masa Yunani yang mana sistem sosial masih tergolong sederhana, sehingga masih sangat mungkin untuk mencipta sekolah seperti Akademianya Plato.

Dengan keadaan seperti ini, bukan berarti tidak mungkin untuk melakukan

reformasi, dan bukan berarti mustahil juga menyelamatkan generasi berikutnya dari pengaruh peradaban dan memutus lingkaran yang ada sehingga bisa menciptakan budaya dan peradaban baru yang sesuai. Selalu ada dua cara dalam mengubah sesuatu, sederhananya, dari atas, alias melalui sistem, dan dari bawah, alias langsung ke akar rumput. Yang kedua inilah harapan utama pendidikan saat ini.

Pendidikan pada hakikatnya berbasis pada perkembangan individu, bagaimana seseorang mengembangkan dirinya menjadi manusia seutuhnya. Memang, subjek dan objek pendidikan seharusnya sama, karena hanya dirilah yang bisa mengembangkan dirinya sendiri. Namun, keberadaan faktor di luar diri sebagai penunjuk jalan menjadi hal yang juga krusial dalam keberhasilan proses pendidikan. Faktor ini dapat dilihat dalam 3 hal, yaitu keluarga, lingkungan, dan pendidikan formal. Maka dengan 3 hal ini lah reformasi paling utama bisa dilakukan.

Reformasi Pendidikan

Berkaitan dengan keluarga, hampir sebagian besar sekolah gagal mendidik adalah karena dari awal tidak terdidik dengan baik oleh orang tuanya. Kemampuan orang tua dalam mendidik adalah kunci utama pendidikan setiap anak. Kesalahpahaman orang tua mengenai proses pendidikan sering menjadi faktor utama orang tua terlalu memercayakan anaknya pada sekolah formal. Tidak ada pendamping terbaik

dalam menentukan bagaimana anak mengembangkan diri selain orang tua, terutama ibu. Apalagi dengan sistem sekolah saat ini yang begitu berbasis kompetensi, pendidikan formal hanyalah media penyalur ilmu, bagaimana ilmu itu diolah adalah suatu bentuk proses pendidikan yang lain. Maka apa? Bagi yang belum menjadi orang tua, persiapkanlah diri dengan baik, jangan yang dipersiapkan hanya

untuk menikah dan kerja, tapi juga untuk menjadi orang tua karena sesungguhnya beban moral menjadi orang tua jauh lebih berat ketimbang jalan hidup yang lain. Bukankah bercita-cita menjadi ibu/bapak yang baik buat anak-anaknya kelak adalah mimpi yang paling mulia?

Selanjutnya, mengenai lingkungan, adalah bagaimana bisa tercipta kondisi saling mendukung untuk mengembangkan diri sebebas-bebasnya. Apa lagi yang bisa dilakukan selain bagaimana kita mentransformasikan ide agar menjadi bentuk inspirasi atau dorongan kepada yang lain untuk melakukan hal yang sama? Siapapun bisa menjadi pendidik dengan terus mengaktualisasi diri sepenuhnya, menciptakan ide dan pemikiran, menyebarkan idealisme dan semangat pada siapapun untuk melakukan hal yang sama, yaitu mengembangkan diri dengan maksimal sebagai bentuk proses pendidikan pada diri sendiri. Dalam hal ini lingkungan adalah faktor yang sangat dinamis, karena komponennya tidak hanya satu-dua orang, namun kolektif dalam suatu kelompok atau bahkan berbagai kelompok. Tidak pernah ada yang salah dari bagaimana seseorang dalam suatu lingkungan, yang terpenting adalah ia dapat berkembang di dalamnya, karena sekali lagi, proses pendidikan adalah proses memanusiakan manusia.

Terakhir, mengenai pendidikan formal, ini adalah satu-satunya hal yang sangat berkaitan dengan sistem pendidikan. Namun terlepas dari

bagaimana sistemnya, yang dalam hal ini berarti menepis 7 standar dari 8 standar nasional pendidikan*) yang ditetapkan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), kunci utama dalam pendidikan formal jika kembali pada hakikat pendidikan itu sendiri adalah yang paling dekat dengan peserta didik sendiri, yaitu guru. Pendidikan bukanlah sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa distandarisasi karena berkaitan dengan keunikan bagaimana tiap individu berkembang. Namun, karena semakin kompleksnya sistem sosial, apalagi dipicu dengan corak peradaban saat ini yang memang berorientasi pada kompetensi, standarisasi ini pun diciptakan. Namun terlepas dari bahwa sebenarnya 8 standar ini punya peran yang juga penting mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan baik, standar pendidik adalah yang paling memengaruhi bagaimana anak dapat benar-benar berkembang sesuai dengan tujuan luhur pendidikan.

Sistem guru dan murid (master and pupil) pada dasarnya sudah ada pada tiap peradaban. Namun fungsi guru bukanlah sekedar menjadi pemberi ilmu, namun sebagai pendamping dan pembimbing, sebagai teman dan saudara, sebagai contoh dan pendorong, bahkan bisa dikatakan pengganti orang tua di luar rumah. Perspektif guru sekarang pun banyak mengalami pergeseran, apalagi paradigma guru besar (dosen) yang dianggap sudah tidak punya tujuan mendidik lagi. Padahal, antara guru SD dan guru PT

sesungguhnya punya beban moral yang sama. Apalagi, guru PT (dosen) adalah penentu terakhir bagaimana seseorang dikatakan paripurna (baca: lulus) menempuh semua proses pendidikan. Ditambah lagi, ketertarikan dan minat terhadap profesi guru saat ini sangat rendah di kalangan para penuntut ilmu. Paradigma terhadap guru pun seringkali salah yang hanya dianggap hanya punya fungsi pengajaran, bukan pendidikan.

Maka gerakan-gerakan akar rumput terhadap proses pendidikan formal adalah yang sangat diperlukan dalam reformasi pendidikan. Karena bila bergantung pada sistem, bagaimana guru dibina, pengawasannya, dan lain-lain, batasannya terlalu banyak karena berkaitan dengan suatu kompleks peradaban. Itulah kenapa gerakan seperti Indonesia Mengajar atau Anak Bertanya menjadi poin penting dalam mengoptimalkan setiap komponen untuk turun langsung ke akar rumput untuk memutus semua lingkaran setan yang ada. Tentu saja, banyak cara kreatif sederhana yang dapat dilakukan untuk mengarah ke sana. Bahkan, sekedar rutin menuliskan gagasan-gagasan melalui media sosial pun adalah suatu proses mendidik, karena selalu ada harapan semua gagasan itu bisa menginspirasi orang lain untuk menciptakan gagasan-gagasan lainnya, suatu efek domino yang bisa berdampak luas dari hal-hal kecil. Namun, semua itu terkait dalam bagaimana kita menjadi diri sendiri. Kembali pada hakikat utama pendidikan, bagaimana

kita bisa mendidik bila kita sendiri belum terdidik. Artinya, bagaimana kita bisa memanusiaikan yang lain bila kita sendiri belum memanusiaikan diri.

Puncak utama pendidikan adalah otentitas atau keunikan diri, dengan seseorang telah menemukan idealismenya sendiri, ciri khasnya sendiri, jati dirinya sendiri. Itulah pendidikan! Lihatlah Zuckerberg, Michelangelo, Galileo, Einstein, atau siapapun, mereka adalah orang yang berhasil mendefinisikan diri mereka sendiri, dan mereka menciptakan jalan mereka sendiri, bukan menjadi pengikut ataupun korban peradaban. Bukan sistem, sekolah, atau bahkan orang tua yang berhak menentukan diri seseorang mau menjadi seperti apa, tapi hanya diri sendiri. Maka apa reformasi terbaik dalam pendidikan? Reformasi lah diri sendiri dalam suatu kesadaran penuh sebagai manusia, sebagai diri yang otentik, sebagai diri, sebagai Aku, bukan sebagai yang lain. Itulah yang paling utama, menjadi diri sendiri! Selanjutnya apa? Sebarkan kesadaran itu secara perlahan melalui hal-hal sederhana, tuliskan gagasan, sebarkan ide, tularkan idealisme, ciptakan karya, semangat dan dukung segala bentuk pengembangan diri. Pada tahap selanjutnya, jadilah guru untuk sesama dengan saling mendampingi dan membimbing, genggam tangan setiap orang dan bekerja samalah dalam harmoni, kembangkan kreativitas dan buatlah sendiri atau ikut membantu gerakan-gerakan sederhana yang berbasis akar rumput.

Secara sederhana, di tengah tindakan yang berpengaruh pada orang kutukan peradaban yang menindas lain. Karena pendidikan hanyalah pendidikan ini, mulailah segalanya bagaimana kita semua menjadi manusia dengan menjadi diri sendiri, kemudian sepenuhnya, bukan sekedar menjadi transformasikan seluruh otentitas dan pengikut zaman, robot peradaban, kesadaran diri dalam bentuk tindakan- sekrup industri, atau budak korporasi.

"Pendidikan bukan persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri"

-- John Dewey --

(PHX)



Balada Korupsi Indonesia

"Orang yang cemburu sepertiku, jika bercermin membelah cermin. Jika Pemilu-menjual suara. Jika tak punya uang-jadi penipu. Jika punya uang-jadi rentenir. Jika menjadi supporter-menyalah-nyalahkan wasit. Jika mencintai-menyakiti. Jika menjadi politisi-korupsi."

- Andrea Hirata -

Belum lama ini tengah hangat isu mengenai revisi UU KPK yang menjadi landasan yuridis berdirinya lembaga yang selama ini dipercaya cukup efektif menangkap dan mengadili pesakitan-pesakitan parasit negara. Mungkin memang wacana terkait korupsi adalah wacana yang bisa membuat hati, telinga, dan pikiran gatal sendiri dengan campuran sensasi antara jengkel, sedih, dan bingung disebabkan betapa wacana ini selalu menghiasi berita-berita sepanjang tahun. Kita sebenarnya bisa memandang korupsi ini dengan beragam cara. Memang tidak bisa dipungkiri sistem dan keberjalanan mekanismenya memberi pengaruh yang cukup besar terkait probabilitas terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan negara. Itu lah yang menjadi fokus utama isu yang akhir-akhir ini tengah berkembang terkait terancamnya KPK untuk dilemahkan, karena memang keberadaan KPK adalah salah satu bentuk penekanan probabilitas terjadinya tindakan korupsi dari segi sistem. Dengan menyempitkan celah-

celah kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, niat-niat untuk melakukan itu bisa ditekan. Ya tentu saja, kesempatan adalah sebab utama mengapa manusia bertindak.

Perbaikan sistemik dengan adanya KPK tidak perlu dinafikan sebagai salah satu usaha yang signifikan. Tapi sebagai anak matematika yang terbiasa mengabstraksi segala sesuatu, aku mencoba membawa wacana ini ke arah lain, toh pengetahuanku mengenai studi kultural maupun ilmu sosial-politik tidaklah banyak. Sebenarnya, korupsi hanyalah satu dari sekian banyak tindakan yang dikategorikan buruk secara moral dan etika, hanya saja karena pendefinisian kita yang terlalu sempit lah membuat kita menganggap korupsi hanyalah sekedar tindakan yang melanggar hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan merugikan negara (definisi korupsi berdasarkan UU Tipikor). Terkait hal tersebut, siapa lagi yang bertugas menanamkan moral dan etika kalau bukan dunia pendidikan?

Menelisik Dasar

Apa sebenarnya korupsi? Sederhana deh. Pernah lihat di komputer ada istilah "corrupted file"? Kita bisa mengartikan hal tersebut

sebagai berkas yang rusak. Korupsi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris corruption yang berkata dasar corrupt. Secara etimologis, kata ini

berasal dari bahasa perancis *corruptus*, atau lebih jauh lagi dari bahasa latin *corrumpō/corrumpere*, yang mana semuanya secara umum bermakna "merusak". Menarik dari situ, anggaphlah bahwa korupsi merupakan tindakan yang secara umum merusak, seperti yang akhirnya dicantumkan pada KBBI Edisi IV yang menuliskan: korup a 1 buruk; rusak; busuk; 2 suka menerima uang sogok; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Jadi tindakan merugikan negara hanyalah subhimpunan dari semesta tindakan korupsi. Melihat korupsi secara umum sebagai sebuah tindakan yang merusak memberi jalan untuk mengaitkannya dengan moralitas manusia.

Terkait hal tersebut, wacana moralitas bukanlah hal yang bisa dengan sederhana dan singkat terbahas. Ribuan tahun manusia mendiskusikan hal yang sama terkait apa yang baik dan apa yang buruk, dan bagaimana menciptakan keselarasan antar tindakan manusia. Subwacana moralitas yang paling utama mewarnai peradaban adalah apa yang kita kenal dengan kebebasan. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa hasrat manusia paling dasar adalah hasrat untuk bebas, dalam hal apapun. Dengan kebebasan seseorang bisa merasa memiliki hidupnya sendiri secara utuh. Namun sayang, dengan hidup berkelompok, kebebasan seseorang pastilah berbenturan dengan kepentingan orang lain, karena pada dasarnya setiap orang saling memengaruhi satu sama lain.

Benturan kepentingan ini lah yang memicu munculnya norma atau tata aturan dalam suatu masyarakat, agar relasi antar kuasa bisa ditata agar lebih teratur.

Sudah begitu banyak tata aturan tercipta semenjak manusia mengenal peradaban yang teratur. Semua pada intinya dibangun dengan niatan yang sama untuk menengahi semua kepentingan agar bisa tercipta keteraturan. Sayang, adanya sistem tata aturan tidak sama dengan menekan hasrat manusia untuk bebas. Bahasa lain dari kebebasan sebenarnya adalah kekuasaan, sejauh apa wewenang manusia untuk melakukan sesuatu. Itulah kenapa ketika tata aturan masyarakat sudah terbentuk pun, pertarungan antar kuasa untuk saling memperjuangkan kebebasan kepentingan masing-masing pun tidak akan pernah lepas. Hal ini yang kemudian mendinamisasikan dunia bertahun-tahun hingga saat ini. Usaha mencari keteraturan di tengah hasrat manusia untuk terus memperjuangkan kebebasannya.

Bisa saja keteraturan itu diciptakan dengan menyamaratakan semua kebebasan yang dimiliki oleh anggota masyarakatnya. Namun adanya stratifikasi sosial, baik secara formal ataupun kultrual, hal itu tidak dapat diwujudkan. Bagaimana juga membuat tata aturan ketika tidak ada yang menegakkannya? Namun ketika ada yang menegakkan tata aturan, artinya akan ada sekelompok orang yang

memiliki kuasa atau kebebasan lebih ketimbang lainnya. Terciptalah kesenjangan, stratifikasi kebebasan manusia dalam suatu kelompok masyarakat, yang mana memiliki banyak bentuk, dari stratifikasi ekonomi hingga stratifikasi pengetahuan. Dari sini pula lah muncul konsep penindas-ditindas, borjuis-proletar, penguasa-jelata, dan lain sebagainya, yang memunculkan ragam ideologi yang sesungguhnya memperjuangkan hal yang sama: kebebasan.

Masuk dalam konteks negara, sekarang kita berada dalam kelompok masyarakat bernama Indonesia yang memiliki tata aturan yang tersusun dalam beragam undang-undang dan peraturan. Semua tata aturan, yang berdiri di atas asas Pancasila memang tentu diniatkan untuk mengakomodasi semua kebebasan dan kepentingan anggota masyarakatnya. Kita semua tahu, satu per satu sistem dicipta untuk menjawab tujuan itu, hingga secara pasti, selalu ada orang-orang yang memiliki kuasa atau kebebasan lebih untuk melakukan sesuatu. Ketika hal ini terjadi, selalu ada kecenderungan manusia untuk memenuhi hasrat dasarnya, yaitu memperluas kebebasan itu, entah dengan keuntungan yang

besar, aksesibilitas terhadap sesuatu, atau keleluasan untuk melakukan sesuatu. Tentu saja dengan tata aturan yang sudah dibuat untuk membuat distribusi kebebasan agar seadil mungkin, ketika ada yang keluar dari koridor aturan tersebut dan mendapatkan kebebasan lebih, ada kebebasan dari orang lain yang terambil. Inilah yang menjadi dasar filsafat moral sesungguhnya, atau kalau pakai bahasa OSKM: kebebasan substansial, yaitu bagaimana hak-hak manusia tercipta selama tidak mengganggu hak-hak yang lain. Ketika ambillah contoh seorang pejabat menerobos batas kebebasan untuk kepentingan diri sendiri dengan mengambil untung pada suatu proyek, ada uang yang seharusnya tersalurkan pada orang-orang tertentu menjadi tidak dapat tersalurkan. Ketika orang-orang terkait seharusnya bisa menikmati penyaluran uang yang “diambil” secara bebas oleh pejabat tadi, kebebasan orang-orang terkait untuk memanfaatkan penyaluran itu jadi terambil. Penggunaan kebebasan yang berlebih ini cenderung membuat keseimbangan kebebasan yang diatur dalam tata aturan tadi terlanggar, sehingga bisa dikatakan sebauh tindakan yang merusak, yang membuat ia bisa diberi istilah “korupsi”.

Memeriksa Akar

Dengan semua itu, lantas bagaimana? Ya ketika melihat fenomena korupsi merupakan wacana moralitas , tentu yang harus kita lihat adalah

subjeknya, yaitu manusia. Tindakan apapun memang selalu terkait dengan subjektivitas pelaku, yang mana dalam hal ini harus melihat penyebab mengapa

pelaku melakukan hal tersebut. Jika mengambil alur siklus dasar, apa yang manusia alami menentukan apa yang manusia pahami, apa yang manusia pahami menentukan apa yang manusia lakukan, dan apa yang manusia lakukan menentukan kembali apa yang manusia alami. Sehingga bertanya mengapa manusia melakukan sesuatu harus ditarik mundur hingga ke seluruh pengalaman hidupnya. Itulah kenapa dalam konteks moralitas, pembunuh paling bejat pun tidak bisa dihukum begituu saja, karena pasti ada sebab dalam pengalaman hidupnya mengapa ia bisa membunuh, dan tentu saja dengan itu, rehabilitasi adalah hukuman paling manusiawi secara moral.

Untuk masalah hukum, banyak pendapat bisa muncul sebenarnya. Misalnya dengan alasan untuk memunculkan efek jera, pelaku korupsi harus dihukum mati walau jelas bertentangan dengan moralitas, yang mana tidak ada manusia yang salah sepenuhnya. Namun terlepas dari hal itu, mungkin yang perlu dipikirkan dalam konteks masyarakat adalah bagaimana mengarahkan pengalaman dan pemahaman masyarakatnya, karena seperti diagram alir tadi, keduanya akan menentukan bagaimana seseorang bertindak, atau secara sederhana, akan membentuk karakter masyarakat. Dengan apa karakter masyarakat dibentuk secara massif? Apa lagi kalau bukan dengan proses pendidikan.

Perbaikan sistemik dengan reformasi birokrasi atau penguatan

lembaga seperti KPK memang perlu, tapi apakah itu akan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya? Tentu tidak, karena akarnya ada pada sebab musabab kenapa orang-orang bisa dengan mudahnya melakukan tindakan korupsi, tentu hal ini secara jauh melihat bagaimana ia berkembang sejak kecilnya. Seperti halnya bagaimana membersihkan gelas yang terus menerus diisi air kotor, tentu akan sangat sulit untuk memisahkan kotoran yang sudah terlarut dalam air. Cara terbaik adalah dengan mengganti sumber air ke gelas tersebut dengan air jernih hingga semua air kotor itu terdorong keluar dengan sendirinya. Melakukan perbaikan sistemik adalah bagaimana kita membuat saringan agar kotoran yang masuk di gelas bisa tersaring, tapi tentu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lantas ada apa dengan pendidikan di Indonesia saat ini sehingga tetap saja pelanggar-pelanggar aturan terus menerus muncul di masyarakat?

Hal ini tidak bisa dijawab secara parsial, karena proses pendidikan adalah proses yang kontinyu dan harus dilihat secara utuh. Kekeliruan pada masa sekolah dasar tidak bisa serta merta dapat diperbaiki pada sekolah menengah, apalagi mengingat alur pembelajaran manusia sangatlah rumit. Selain itu juga, tidak hanya pendidikan formal di sini memainkan peran, namun juga pendidikan informal, dari orang tua dan lingkungan. Tapi apakah sesederhana itu? Tentu saja tidak, karena dalam hal ini pelaku pendidik melibatkan banyak komponen yang

mana harus memiliki kesadaran yang sama terkait seberapa jauh batasan pendidikan yang baik ditanamkan. Ketika orang tua memikirkan anak itu harusnya seperti A, dan sekolah memikirkan B, maka pendidikan tidak akan bisa berjalan secara menyeluruh dan optimal. Di sinilah tantangan utamanya, apalagi, ada variabel lingkungan yang tidak terkontrol. Dengan majunya teknologi seperti sekarang ini, sehebat-hebatnya orang tua mencegah pun alur informasi terlalu deras untuk ditahan, kecuali jika tinggal di tengah hutan. Terkait hal itu, penyaringan informasi lebih diperlukan, namun tentu saja membutuhkan usaha yang tidak mudah. Sayang, pada realitanya, dengan beragam sebab, orang tua selalu memberikan kebebasan pada anaknya tanpa adanya pendampingan intensif, terlebih lagi, tidak ada kerja sama yang baik antara sekolah dan rumah karena perspektif pendidikannya yang begitu beragam.

Pada intinya, masalah terkait pendidikan ini sudah mengakar sedalam-dalamnya hingga ke tataran kesadaran akan pendidikan itu sendiri. Aku cukup yakin lebih dari 50% pelaku pendidik (guru dan orang tua) belum memiliki kesadaran yang utuh terkait pendidikan yang baik seharusnya seperti apa. Dilema ini diperparah dengan adanya komersialisasi pendidikan, yang mana anak-anak cenderung disekolahkan sekedar agar kelak bisa mendapat pekerjaan, bukan karena ilmu. Padahal secara ideal, sekolah (apapun, dari SD hingga PT)

punya dua fungsi, yaitu pengajaran intelektual dan pengajaran moral, namun kecenderungannya hanya sebatas pengajaran intelektual itu pun mengalami banyak penyimpangan karena adanya tuntutan-tuntutan lain (selebihnya baca penindasan pendidikan bagian 1 dan bagian 2). Standarisasi yang ada secara nasional pun cenderung penilaian yang mengukur kecerdasan, bukan yang mengukur kebaikan atau karakter. Hal ini mengakibatkan fokus-fokus sekolah hanyalah pada keterampilan dan pengetahuan, bukan pada kebaikan. Ditambah lagi, standar kebaikan orang-orang bisa sangat berbeda-beda.

Membahas detail terkait banyaknya ironi di dunia pendidikan Indonesia akan menjadi pembahasan panjang tersendiri, karena permasalahannya cukup luas dan kompleks. Maka cukup sekarang mari kita lihat hal ini dalam perspektif pencegahan tindak korupsi. Mungkin ketika sudah dalam tataran nasional, tindakan ini memang begitu terlihat nyata karena memang lingkungannya sudah sangat besar. Untuk melihat akarnya, kenapa tidak melihat analogi tindakan korupsi dalam tataran nasional ke dalam tataran yang lebih kecil. Kita tentu sudah banyak tahu iklan-iklan anti korupsi yang memperlihatkan bahwa tindakan sederhana seperti menyontek merupakan cikal bakal tindakan korupsi pada tataran yang lebih besar nantinya. Tentu banyak hal-hal kecil lain yang selama ini disepelekan sesungguhnya kelak menjadi tindakan yang

berpengaruh cukup besar. Itulah sebenarnya pembentukan karakter tidak bisa dilakukan setengah-setengah, harus utuh dan komplit. Bagai membangun sebuah bendungan yang kokoh, karena ada retak sedikit bisa mengakibatkan runtuhnya keseluruhan struktur. Dalam hal ini memang pendidikan yang bersifat totalitas yang mana pendidik bisa mengawasi, membimbing, dan membina peserta didiknya sepanjang waktu yang mungkin lebih berhasil dalam mencetak karakter secara utuh, ambillah contoh pesantren atau pendidikan militer. Namun itu sendiri pun tidak cukup, karena pada akhirnya mengingat manusia adalah eksistensi yang sangat tidak sederhana, banyak variabel lain bisa masuk untuk memengaruhi.

Pada tataran mahasiswa sendiri hal ini bisa cukup terlihat, mengingat masukan peserta didik pada pendidikan tinggi merupakan hasil bertahun-tahun pendidikan sebelumnya. Walau sebenarnya tidak bisa digeneralisasi secara cuma-cuma, terkadang menjadi tanda tanya tersendiri bagiku ketika melihat perilaku-perilaku sederhana seperti istilah lobbying satpam, mengadakan kegiatan tanpa izin, dana proposal yang digelembungkan, ketidakrapihan arsip, manipulasi surat, mudahnya membolos, titip absen, dan hal-hal lainnya yang sebenarnya pada

realitanya hanya menjadi lelucon sehari-hari seakan semuanya adalah kewajaran. Tidakkah ada yang pernah coba membayangkan pada lingkup besarnya, semua tindakan kecil itulah yang menghasilkan tindakan-tindakan penggelembungan dana proyek, kongkalikong antar kepentingan, dan banyak hal-hal lainnya. Pertanyaan sederhana yang mempertanyakan mengapa lulusan ITB masih bisa tejerat kasus korupsi pun bisa ku jawab secara sederhana juga. Idealisme yang terbangun selama jadi mahasiswa tidaklah utuh karena hal-hal sepele dan kecil diabaikan, bahkan justru dianggap wajar dan dijadikan kebiasaan. Kita terlalu jauh memikirkan idealisme yang besar-besar sedangkan idealisme kecil-kecilan seperti tidak menyisakan makanan sebutir nasi pun sering dipelekan. Dianggap tidak relevan? Cih, karakter yang meremehkan hal kecil itulah yang sesungguhnya membuat orang-orang ketika berada di atas awan semakin tidak mampu melihat hal-hal akar rumput. Mungkin ketika kita di sini bisa saja meremehkan pertanggungjawaban 500 rupiah yang mana mungkin hanya 0.0001 % dari total dana sesungguhnya, tapi dalam tataran nasional, 0.0001% itu bisa sama dengan jutaan rupiah. Hal kecil? Ya tentu saja, tapi kebiasaan melihat hal besar membuat kita lupa dengan hal tersebut.

Dilema budaya

Berbicara pendidikan tidak akan lepas dari membicarakan budaya,

karena seperti kata Ki Hajar sendiri, budaya terbentuk dari hasil pendidikan.

Sesungguhnya dalam sektor pendidikan sendiri, tiap tahunnya tentu pasti selalu ada penyempurnaan, apa lagi tentu sudah banyak orang-orang yang menaruh perhatian lebih pada dunia krusial ini, walau pada akhirnya pada tataran praktiknya sangatlah sulit untuk diwujudkan. Kenapa? Karena yang berperan penting untuk mewujudkan kesadaran pendidikan yang utuh adalah pendidik-pendidiknya. Sayangnya, dalam lingkup pendidik sendiri pun masih sedikit yang benar-benar sadar akan makna sesungguhnya pendidikan sebagai proses memanusikan manusia. Bisa kita lihat dengan mudah ada berapa banyak guru yang benar-benar 'mendidik', ketimbang yang sekedar mengajar. Maka jika ditarik mundur, pendidik-pendidik sendiri masih perlu dibangun kesadaran akan pendidikannya. Namun siapa yang bisa mewujudkan itu? Pada akhirnya semua hanya akan menjadi lingkaran setan tersendiri. Diklat-diklat yang diberikan pada guru pada akhirnya cenderung hanya formalitas yang hanya memberi pengetahuan teknis ketimbang karakter itu sendiri. Lagipula apa yang bisa ditanam pada seseorang yang cenderung sudah melewati bertahun-tahun hidup yang mengeraskan karakter utamanya? Guru-guru itu sendiri pun merupakan hasil pendidikan dengan sistem yang sama. Lingkaran setan? Ya. Asalnya dari mana? Marilah memutar terus lingkaran itu mundur hingga melihat apa yang sebenarnya terjadi.

Mengawali lagi dengan pertanyaan , tidakkah merasa aneh ketika Indonesia,

yang dikatakan memiliki kearifan lokal yang mengakar secara budaya pada seluruh nusantara memiliki indeks persepsi korupsi pada urutan ke-88 dunia? Apa jangan-jangan kearifan lokal itu hanyalah utopia dari hegemoni masa lalu? Ataukah justru, kearifan lokal itu sendiri yang sebenarnya menjadi penyebab tumbuh suburnya korupsi di negeri ini? Tentu bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab, tapi tentu itu hal yang tidak bisa kita abaikan mengingat sejarah menjadi bagian penting pembentukan identitas. Seperti halnya karakter manusia ditentukan oleh pengalamannya sejak lahir, maka karakter Indonesia pun ditentukan dari perjalanan sejarahnya.

Terkait hal tersebut, mungkin kita perlu melihat ke belakang bagaimana keadaan dulu ketika belum ada kaum ras kulit putih dari manapun menginjakkan kaki di nusantara. Dulu, masyarakat nusantara secara mayoritas cenderung memegang hukum adat, tidak tertulis dan cenderung bersifat lisan, kebiasaan, tradisi, dan turun-temurun. Walau mungkin ada sebagian kecil kerajaan yang mungkin sudah memiliki catatan tertulis, namun tetap adat lah yang menjadi warna utama. Hal ini juga memang didasarkan pada kecendeurngan pemikiran timur, termasuk Indonesia ,yang lebih menekankan hidup pada moralitas dan kebaikan, ketimbang pemikiran barat yang lebih banyak mempertanyakan eksistensi, metafisis, rasionalitas, dan sebagainya. Lihatlah Cina atau Jepang yang juga memiliki kearifan loka l yang

mengakar pada budayanya, yang mana juga sangat menekankan pada moralitas dan kebaikan. Dengan terbiasanya masyarakat nusantara pada hukum adat, yang mana tanggung jawab moral lebih berperan untuk menciptakan keterturan di dalam masyarakat, yang mana kontrol datang dari sesama masyarakat, atau mungkin raja.

Kemudian, datanglah kapal-kapal dari arah barat untuk mencari rempah-rempah, dari portugal, spanyol, lalu belanda, yang akhirnya menjajah nusantara selama 3,5 abad. Tentu saja di sini lah terjadi benturan budaya antara barat dan timur. Begitu kontras perbedaan budaya ini sehingga alkulturasi yang terjadi tidaklah sederhana. Salah satunya aperedbedaan itu adalah kecenderungan nusantara yang menggunakan adat dan tradisi sebagai tata aturan dengan kecenderungan barat yang sudah memakai hukum pidana tertulis. Perbedaan sistem hukum ini menciptakan karakter hibrida yang mana masyarakat nusantara yang cenderung terbiasa melakukan sesuatu karena tanggung jawab moral, menjadi tanggung jawab formal. Efeknya apa? Bisa sangat beragam. Betapa berbahayanya proses alkultasi yang tidak matang sebenarnya tidak bisa dipandang remeh. Lihatlah contoh ketika anak-anak desa yang mencoba sok-sokan bergaya urban namun akhirnya malah jadi terlihat aneh.

Tidak terbiasanya masyarakat nusantara dengan sistem hukum tertulis lah yang membuat mekanisme kaku

birokrasi tidak mudah dipahami dengan baik dan cenderung dilanggar. Terlebih lagi, sifat masyarakat Indonesia yang cenderung komunal membuat rasa ingin membantu atas dasar pertemanan atau kekeluargaan bisa cukup tinggi. Sayangnya, paradigma barat yang cenderung individualistik perlahan teralkulturasi juga namun dalam bentuk yang tidak sempurna. Akhirnya apa, muncullah pelanggaran-pelanggaran atas nama kepentingan pribadi namun disokong ragam bantuan atas dasar perkawanan. Perhatikan bahwa memang rasa tidak enak untuk menolak permintaan tolong di masyarakat Indonesia bisa lebih besar ketimbang masyarakat luar, khususnya barat. Terbiasanya masyarakat Indonesia terhadap kontrol sosial dengan adanya hukum adat juga membuat rumitnya birokrasi akan mudah diterobos, sedangkan virus individualistik dari barat membuat kontrol sosial ini semakin minim. Jadi sederhananya, budaya yang sudah tertanam kuat di masyarakat melebur dengan budaya yang cenderung berlawanan dengannya secara tidak sempurna. Kearifan lokal tentu terkikis dengan budaya rasionalis barat, namun sifat-sifat dasar komunal seperti hasrat untuk membantu, gotong royong, rasa tidak enak untuk menolak, dan lain sebagainya masih ada, membuatnya terarah ke hal negatif, jadi gotong royongnya dalam hal korupsi deh.

Tentu saja apa yang ku gambarkan tadi adalah abstraksi kasar dari yang sesungguhnya terjadi. Proses alkulturasi

budaya nusantara dengan budaya barat terjadi cukup rumit mengingat sejarah nusantara juga panjang dan penuh lika-liku. Namun memang apa yang ku lihat adalah proses akulturasi ini terjadi secara tidak lengkap dan sempurna, membuat rakyat Indonesia jadi "banci", sudah ikut-ikutan kebarat-baratan tapi tidak bisa move on dari budaya lokalnya. Semangat untuk membangun kembali kearifan lokal jadi hanya semacam formalitas agar ya Indonesia masih ada sesuatu yang bisa dibanggakan lah. Jika memang mau membangun kearifan lokal, blok apapun yang datang dari barat dan bangun segalanya dengan kaki sendiri. Lihatlah jepang yang mana meniti dan mengembangkan semuanya dengan tangan dan kaki sendiri, walau memang menyerap ilmu dan teknologi dari luar, bukan sekedar memasukkan begitu saja tanpa ada saringan, agar budayanya tidak ikut masuk, atau paling tidak tersaring dengan baik. Selain itu, keragaman budaya di Indonesia membuat masyarakat nusantara tidak bisa berjuang bersama untuk mempertahankan budaya yang dimilikinya. Orang sunda tidak akan paham dengan apa kearifan lokal jawa yang harus dijaga, atau sebaliknya. Sedangkan melirik jepang, satu negara cenderung memiliki budaya yang sama, sehingga mereka bisa melestarikannya secara komunal dan massif. Itulah mengapa hingga saat ini, budaya di Jepang tidak terkikis, bahkan mengalami modernisasi juga tanpa harus

kehilangan makna dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Dilema bukan? Apa yang seharusnya menjadi kebanggaan justru bisa jadi yang menyebabkan kehancuran. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi slogan kaku karena Tunggal di sini tidak berada dalam persepsi yang sama. Pancasila yang dibuat dengan semangat menyatukan ragam budaya dalam satu nilai yang sama pun pada praktiknya tidak terhayati dengan baik. Pada akhirnya karena budaya kita begitu beragam dan terpisah-pisah, akan mudah dikikis sedikit demi sedikit, dikontaminasi oleh budaya barat yang akhirnya menghasilkan budaya hibrida yang kita miliki sekarang, semangat bergotong-royong untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hukum adat sudah mengikis dan kontrol sosial semakin hilang. Orang-orang semakin sibuk dengan dirinnya sendiri, padahal sifat yang tidak terbiasa dengan hukum tertulis kaku masih ada. Jadi deh semua tindakan korupsi yang kita lihat sekarang.

Lantas apa? Sayangnya semua hal ini terjadi layaknya sebuah kewajaran sejarah. Apa yang bisa dilakukan ketika memang faktanya telah terjadi seperti itu? Kita mungkin perlu melihat ke depan baiknya seperti apa. Tapi sayang, melakukan perbaikan melalui dunia pendidikan sendiri untuk meluruskan kembali budaya yang kita miliki dan menanamkan nilai-nilai yang seharusnya, serta membentuk karakter

masyarakat pun mengalami banyak dilema seperti yang ku paparkan di atas. Serba salah. Maju kena mundur kena. Di tulisanku yang lain pun, aku menjelaskan betapa merananya Indonesia ini: Jika tidak ingin tertinggal, mau tak mau kita harus mengikuti kompetisi global, namun hal itu akan mengarahkan pendidikan semakin terkomersialisasi dan hanya terfokus pada keterampilan dan intelektualitas semata, namun jika pendidikan ingin diresotorasi ke kodrat sesungguhnya untuk menumbuhkan kembali jati diri masyarakat, yah kita harus siap ditinggal negara-negara yang tengah lomba lari di luar sana.

Kembali dalam Kontemplasi

Yah, memang alangkah lucunya negeri ini. Terlalu banyak dilema yang menghambat kita untuk memperbaiki diri. Tekanan muncul dari beragam arah, tekanan global dari luar untuk terus bersaing, menuntut kita untuk terus menciptakan intelektual-intelektual handal yang terampil dan inovatif, atau tekanan lokal dari dalam untuk memperbaiki mental bangsa, menuntut kita untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan agar kembali ke jalur yang benar sebagai sebuah proses memanusiakan manusia demi tegaknya kembali jati diri bangsa. Ketika pada akhirnya kita terus maju bersaing pun, kita tidak berdiri di atas mana-mana, karena jati diri kita perlahan terus mengikis.

Terkait dilema budaya yang kita hadapi saat ini, marilah ingat kembali apa kata Soekarno: "Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, dari pada makan bistik tetapi budak. Tradisi Bangsa Indonesia bukan tradisi tempe. Kita di zaman purba pernah menguasai perdagangan di seluruh Asia Tenggara, pernah mengarungi lautan untuk berdagang sampai ke Arabia atau Afrika atau Tiongkok"

Terkait hal tersebut, semangat pemerintah sekarang yang mengedepankan kemandirian bangsa dengan trisakti sesungguhnya hal yang patut diapresiasi. Jika berbicara secara khusus mengenai tindakan korupsi, slogan reformasi birokrasi dan revolusi mental adalah konsep yang tidak main-main, karena memang dua itulah kunci perbaikan negara saat ini. Reformasi birokrasi untuk pencegahan tindakan korupsi dari sistem, dan revolusi mental untuk pencegahan tindakan korupsi dari pelakunya. Tap tentu itu adalah konsep ideal. Praktiknya? Luar biasa tidak mudah. Kenapa? Karena yang berperan untuk mewujudkannya haruslah dari semua pihak. Jika semangat itu hanya ada di pemerintah, hasilnya akan nihil. Bagaimana pemerintah mau reformasi

birokrasi jika UU KPK aja direvisi seperti itu, pakai ada namanya dewan pengawas lah. Dari masyarakat sendiri tetap saja tidak menghargai birokrasi-birokrasi yang ada dengan banyaknya penyelewengan sistem. Bagaimana juga pemerintah mau revolusi mental jika masih banyak dosen yang meremehkan telat atau ketidakhadirannya mahasiswa di kelasnya. Bagaimana pemerintah mau mewujudkan kemandirian jika kesadaran politik rakyatnya tidak dibangun dan justru dibodohi. Kesadaran untuk perbaikan harus ada di semua lini.

Aku tidak terlalu mempermasalahkan revisi UU KPK. Kenapa? Karena baunya politis banget. Di sini aku hanya mengabstraksi fenomena korupsi ini lebih luas agar kita sadar bahwa adanya KPK hanyalah satu jalan untuk pemberantasan korupsi. Karena ku rasa percuma apabila pendidikan di Indonesia masih seperti sekarang. Koruptor baru akan terus lahir dan bermunculan. Ujung-ujungnya KPK hanya capek sendiri. Absurd. Seperti sisifus yang tidak henti-hentinya membawa batu ke puncak gunung yang akhirnya jatuh lagi. Tidak perlu lah sampai dinamai "Pendidikan Anti-Korupsi" karena itu hanya akan jadi formalitas. Toh, yang namanya pendidikan anti-korupsi ya pendidikan secara keseluruhan. Kita tidak bisa melihat kasus adanya tindakan korupsi ini secara parsial saja, karena itu terkait karakter utuh seorang manusia yang dibangun dalam sebuah sistem pendidikan terstruktur dari PAUD

hingga PT. Slogan "Berani Jujur" pun hanya akan menyempitkan pandangan bahwa korupsi hanya masalah ketidakjujuran, padahal korupsi adalah secara utuh terkait erat dengan moralitas dan karakter seorang manusia keseluruhan.

Lalu apa yang bisa kita lakukan ke depannya? Sebagai mahasiswa ya cukup dengan mendukung pemerintah dengan semangat yang sama, menyebarkan kesadaran yang sama seluas mungkin, di tambah dengan terus membekali idealisme dalam diri agar kelak siap bertarung di medan perang sesungguhnya. Karena toh kampus ini pada akhirnya hanyalah barak-barak pelatihan bagi para tentara intelektual untuk kelak siap bertarung memperbaiki bangsa. Lah tapi kalau barak-nya sendiri melenceng dari tujuan? Hah, itu tentu jadi bahasan lain, ketika kampus sendiri juga kehilangan jati diri.

Ya cukup sadari jugalah bahwa banyak tindakan-tindakan kecil sesungguhnya merupakan tunas dari tindakan korupsi. Bukankah ketika kita tidak masuk kelas alias bolos, kita mengorupsi uang orang tua kita yang sudah membayar kita kuliah untuk memasuki kelas tersebut? Apakah kesadaran itu ada di tiap mahasiswa? Ya ketika melihat seperti ini, aku merasa wajar-wajar saja jika satu dari lulusan ITB kelak akan jadi koruptor. Seperti yang ku blang sebelumnya, kebiasaan meremehkan hal kecil lah yang kelak akan menjadi tindakan korupsi pada tataran yang lebih besar. Pentingnya

idealisme sekeras mungkin tanpa ada toleransi adalah salah satu bentuk pembentengan diri dari hal-hal tersebut.

Apa yang kupaparkan toh bisa jadi tidak sepenuhnya tepat. Tapi walaupun tidak tepat, semoga memang lebih ada harapan. Karena aku sendiri cenderung pesimistis terhadap semua ini. Terakhir, pada akhirnya semesta tidak terdiri atas atom, tapi terdiri atas kisah, demikian pula Indonesia. Sekarang sebagai salah

satu pemain dalam kisah ini, mengapa tidak berusaha berperan lebih? Memang ku akui, sepertinya butuh jiwa yang sangat sangat sangat sangat optimis untuk tetap semangat membangun Indonesia dengan dilema seperti yang ku paparkan di atas. Apakah kita kelak memang akan menjadi bangsa yang besar, seperti yang diimpikan oleh pendahulu-pendahulu kita, hanya bisa dijawab dalam diri masing-masing. Jadi, renungkanlah!

(PHX)



Antara Intelektual dan Sebuah Institut 4

Mungkin ini hanya rangkuman dan tambahan singkat dari 3 tulisan sebelumnya. Karena sebenarnya wacana mengenai ITB tidak akan merambat terlalu jauh dari bagaimana fungsi ITB sebagai sebuah pabrik intelektual. Keinginan untuk menulis tulisan lanjutan sebenarnya sudah ada sejak obrolanku dengan Pak Hendra terkait semakin minimnya orang-orang yang mengabdikan diri untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya seminar oleh MWA- WM beberapa hari yang lalu, aku memunculkan kembali wacana itu ke pikiranku, walau sebenarnya tidak banyak konstruksi ide yang bisa dilakukan. Yah, semoga bermanfaat saja.

Banyak yang bilang bahwa pendidikan merupakan kunci dari berkembangnya suatu bangsa. Tidak bisa dipungkiri memang, pendidikan memegang peranan penting dalam pengembangan manusia, dari keterampilan dasar, pengetahuan, hingga karakter. Itulah kenapa wacana mengenai pendidikan sesungguhnya merupakan wacana yang tidak pernah habis dibahas selama bangsa itu masih ingin terus mengembangkan diri. Sudah jelas bahwa proses pendidikan bukanlah proses yang singkat, bahkan bertingkat-tingkat pada praktik formalnya, dari dasar, menengah, hingga tinggi. Jika

melihat dari tujuan luhur pendidikan, yakni memanusiaakan manusia, tentu mereka yang telah menempuh keseluruhan tingkat bisa lebih "termanusiakan" dengan kematangan pikiran maupun karakter yang secara utuh terwujud dalam diri seorang individu. Dari sini lah kemudian muncul istilah intelektual. Ya, kaum yang dikatakan menjadi pemegang arah perubahan.

Ada apa dengan kaum intelektual? Sudah banyak wacana bisa dibahas terkait makhluk yang satu ini, termasuk 3 tulisan sebelum ini (bagian 1, bagian 2, bagian 3). Memang cukup menarik bila kita bisa telaah terus menerus mengenai kaum intelektual, mengingat memang bukanlah sebuah kekeliruan bila dikatakan bahwa dari kaum inilah perubahan bisa diciptakan. Setelah mencoba membahasnya pada dua tulisan pertama, seperti halnya tulisan ketiga, penulis kali ini tertarik untuk membahas pabrik yang memproduksinya: perguruan tinggi. Mungkin judulnya kelak akan sedikit kurang relevan karena yang saya bahas bukan sekedar sebuah institut, namun perguruan tinggi secara lebih luas, mengingat institut hanyalah salah satu bentuk perguruan tinggi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012.

Dilema Pendidikan Tinggi

Bila berbicara mengenai pendidikan tinggi, tentu saja apa yang terbayang adalah kampus-kampus dengan beragam macam gambaran dan nama, beserta rangkaian proses kuliah, kegiatan-kegiatan, dan riset-riset.

Bayangan tersebut tidak lah salah, walau mungkin bayangan mengenai Academia yang dibangun plato dulu, bisa sangat lah jauh berbeda. Pendidikan tinggi secara sederhana merupakan tingkatan lanjutan proses pendidikan formal dari pendidikan menengah, yakni SMA/SMK dan SMP. Karena tidak ada lagi tingkatan di atasnya, bisa dikatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan gerbang terakhir proses pendidikan formal yang dilalui manusia, walau sebenarnya pendidikan tinggi itu sendiri masih berjenjang, dari diploma satu hingga doktoral.

Sebagai sebuah gerbang terakhir proses pendidikan, pendidikan tinggi harus bisa menyelesaikan tujuan pendidikan selengkap mungkin pada tataran ini karena tidak bisa lagi 'menitip' untuk diselesaikan pada tingkat berikutnya. Setelah melalui pendidikan tinggi, minimal seseorang pasti akan memasuki dunia kerja, atau dunia dimana pembelajaran tidak lagi dibekali pengaman atau pemakluman. Maka demikian tentu beban pendidikan tinggi tidaklah ringan, ia menjadi penentu akhir bagaimana manusia yang kelak membangun negara, apalagi mengingat sesungguhnya manusia yang diharapkan oleh tujuan luhur pendidikan tidaklah mereka yang sekedar cerdas, pintar, ahli, atau terampil pada suatu bidang, namun berkepribadian, berkarakter, dan berbudaya. Namun sayang, hal-hal terakhir inilah yang jarang dilirik, seakan pendidikan karakter terhenti di pendidikan menengah.

Paradigma mengenai pendidikan tinggi cenderung bergeser ke arah keterampilan dan pengetahuan ketimbang tujuan sesungguhnya dari apa yang disebut dengan pendidikan. Metode-metode pengajaran di kelas maupun atmosfer yang tercipta di kampus tidak lagi menekankan pembinaan karakter dan budaya, walaupun masih ada serpihan-serpihannya terlihat dalam beberapa kondisi. Peningkatan human capital berbasis pengetahuan dan keterampilan ini menggeser jauh definisi manusia yang seharusnya 'dimanusiakan' melalui proses pendidikan.

Pembahasan mengenai bagaimana seharusnya pendidikan akan menjadi wacana yang cukup panjang, yang sudah sebagian ku bahas pada tulisan yang lain (Penindasan Pendidikan Bagian 1 & Bagian 2). Pendidikan selalu mengalami dilema yang sangat besar dengan adanya globalisasi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam konteks negara. Kebutuhan tenaga-tenaga terampil dan inovatif yang dibutuhkan untuk pembangunan selalu dibebankan pada pendidikan tinggi, membuat pendidikan semakin hilang arah. Kebebasan dan kebenaran akademis hanya menjadi 'alat' dan metode, bukan menjadi hal yang ingin disempurnakan untuk membangun kesadaran manusia seutuhnya. Apakah ini masalah? Pertanyaan itu menjadi semakin kesulitan mencari jawaban. Di sisi lain, tentunya kita akan sangat merindukan pendidikan tinggi menjadi seperti Academia-nya Plato dimana

pelajar-pelajar di dalamnya belajar dan berdiskusi sendiri untuk mencapai kesadaran penuh dirinya sebagai manusia yang paripurna, namun dalam sebuah zaman yang semakin kompleks, kebutuhan dalam kehidupan komunal luas setara negara membuat kita mau tidak mau pragmatis dan realistis untuk lebih mementingkan pengembangan kualitas pengetahuan dan keterampilan untuk kemajuan bersama ketimbang idealisme rumit mengenai kesadaran dan kebebasan manusia dalam menggapai kehidupannya.

Beban pendidikan tinggi sebenarnya terletak pada lulusannya, karena dari lulusannya lah bisa dinilai apa yang sesungguhnya dicapai dalam proses pendidikan formal tingkat akhir ini. Secara umum, arah lulusan ini bisa dilihat dalam 3P: Politisi, Pengusaha, dan Profesional. Pada dasarnya 3P itu adalah 3 dunia yang 'punya kuasa' dalam tataran masyarakat, namun dengan cara yang berbeda-beda. Terkait hal tersebut, pendidikan tinggi, atau perguruan tinggi, memegang kunci yang sangat kuat sebagai tempat dimana kebebasan berpikir diutamakan. Mimbar bebas pemikiran selalu menjadi hal yang sangat ditakuti kekuasaan apapun. Hal ini pula lah yang membuat kampus ditekan melalui NKK/BKK pada masa orde baru, karena kampus memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Sayangnya, bergeser orde dan zaman, kampus tetap seakan terus ditekan dalam berbagai arah yang berbeda, mulai dari globalisasi, industrialisasi,

liberalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Pada titik akhirnya, kekuatan yang sesungguhnya dimiliki kampus untuk menyeimbangkan 3 dunia tersebut semakin menumpul dengan adanya tuntutan-tuntutan lain yang menyingkirkan tujuan kampus sesungguhnya.

Akhir-akhir ini disemarakkan pembahasan mengenai bahwa agar suatu negeri dapat menjadi makmur, paling tidak 2% populasinya merupakan wirausahawan, pembahasan yang membuat *entrepreneurship* menjadi sesuatu yang diagung-agungkan sehingga menjadi fokus pengalih dalam pengembangan diri dan pendidikan. Hal ini terkait dengan pengembangan jiwa-jiwa inovatif dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi. Tentu ini tidak salah, karena kewirausahaan sendiri merupakan satu dari 3 dunia yang menjadi kunci utama dinamisasi masyarakat, tapi apakah lantas kemudian ia mengalihkan konsentrasi pendidikan tinggi? Entah seberapa signifikan, namun sudah mulai terlihat pergeseran arah di dunia kampus yang mana hal-hal terkait inovasi dan kewirausahaan cenderung lebih diminati ketimbang hal-hal lainnya. Padahal, bila melihat persaingan sesungguhnya di pendidikan tinggi, yang secara sederhana diukur dengan tolok jumlah jurnal yang dipublikasikan, Indonesia masih jauh dari kurang. Hal ini bisa jadi disebabkan fenomena ketika dunia profesional mulai jarang dilirik oleh kalangan mahasiswa sebagai titian karir

yang akan dibangun dalam hidupnya. Kerja di suatu perusahaan, atau menciptakan usaha sendiri adalah tren paling utama yang muncul terkait lulusan perguruan tinggi ketimbang fokus di bidangnya, menjadi praktisi atau peneliti untuk kemudian terus menerus memproduksi karya-karya akademis demi meningkatkan kualitas pengembangan ilmu di Indonesia. Jika dalam rangka mengembangkan ilmu saja perguruan tinggi masih belum bisa mencapainya dengan baik, bagaimana dengan tujuan sesungguhnya pendidikan untuk membina dan mendidik karakter bangsa?

Untuk bisa meningkatkan kualitas lulusannya sendiri pun, pendidikan tinggi tidak bisa serta merta melihat proses sebagai faktor utama. Karena menjadi tingkatan pendidikan terakhir, pendidikan tinggi sebenarnya mendapatkan 'siswa' dari tingkatan-tingkatan sebelumnya untuk diselesaikan. Input peserta didik yang memasuki tingkatan pendidikan tinggi telah melalui tahun-tahun yang berbeda sebelumnya, sehingga adalah sebuah kesulitan besar untuk menyamakan semua masukan yang berbeda-beda ini untuk menjadi keluaran dengan standar yang setara. Itulah kenapa pertanyaan mengenai kenapa seakan-akan kebutuhan sarjana yang berkualitas di Indonesia tidak pernah terpenuhi tidak bisa dilihat sebelah mata hanya dari pendidikan tinggi. Semua itu terkait dengan masukan peserta didik yang memasuki dunia pendidikan tinggi sendiri, kualitas pendidikan tingginya,

jumlah kursi yang tersedia, hingga kesadaran untuk menempuh pendidikan. Semua faktor ini cukup sulit terbaca dengan baik karena saling mempengaruhi. Apakah memang jumlah kursi yang tersedia di pendidikan tinggi kurang, atau sebenarnya sudah cukup namun tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi? Atau apakah kualitas pendidikan tingginya yang bermasalah, atautah masukan peserta didiknya sendiri yang cukup sulit untuk dibentuk sehingga permasalahannya menyeleruh ke semua tingkatan pendidikan?

Memang jika melihat permasalahan pendidikan, akan cukup sukar jika hanya melihat secara parsial karena pendidikan sendiri merupakan satu keutuhan proses dari manusia lahir hingga dewasa. Sayangnya, karena merupakan pabrik keluaran terakhir, pendidikan tinggi seakan diberi beban terbesar untuk menyelesaikan semuanya. Padahal di pendidikan tinggi sendiri, perhatian terhadap pendidikan karakter dan budaya sangatlah minim. Seperti yang sudah saya jelaskan pada tulisan saya yang ke-3, perguruan tinggi seperti ITB cenderung 'pincang' karena hanya menghasilkan manusia-manusia terampil dan berpengetahuan namun minim kesadaran dan wawasan sosial. Walau sebenarnya secara dilematis hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang juga sulit untuk dihindari dan diselesaikan. Memang akhirnya seperti yang dikatakan seorang dosen, "ITB under pressure". Mempertahankan

idealisme pendidikan di zaman yang semakin maju ini adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Apalagi dengan adanya MEA, tujuan utama

pendidikan semakin terkikis dan terkoyak, membuat Plato mungkin hanya bisa menangis melihat keadaan.

Kapitalisasi Ilmu

Dilema yang dialami ITB sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi memang cukup besar. Apalagi ITB semakin diarahkan menjadi pusat riset dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas baru yang terkait dengan pengembangan ilmu. Tentu saja hal ini merupakan hal yang bagus jika melihatnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas riset dan publikasi jurnal di Indonesia. Tapi apakah memang niat baik untuk memajukan riset ini dilakukan dengan semestinya? Salah satu tantangan terbesar dari pengembangan riset di semua negara adalah besarnya dana yang dibutuhkan. Hal itu juga lah yang dialami Indonesia, hingga akhirnya muncullah konsep triple helix yang juga mengarah pada paradigma entrepreneurial university.

Triple helix pada dasarnya adalah ide untuk menggabungkan 3P agar tersinergikan dengan baik. Pengusaha alias dunia bisnis dan industri menyediakan modal riset sekaligus berperan untuk mengaplikasikan secara langsung semua hasil riset agar bisa dinikmati oleh masyarakat, profesional alias dunia akademik sebagai penyedia modal manusia, ide, dan inoasi untuk kemudian langsung dikembangkan lebih lanjut oleh industri, dan politisi alias

dunia pemerintahan menyediakan regulasi yang dibutuhkan agar dua dunia yang lain bisa terkoordinasikan dengan baik. Namun pada akhirnya dalam interpretasi yang berbeda, hubungan antara dunia industri dan dunia akademik bisa semakin memperjelas bagaimana ilmu semakin terkapitalisasi.

Entah apakah Indonesia sudah terjadi sejauh apa, namun yang pada akhirnya terjadi adalah riset cenderung dimodali oleh industri dan bisnis yang mana kelak hasilnya dijadikan paten perusahaan terakit dan menjadi rahasia dagang. Riset yang seharusnya tidak boleh didorong motif mendapatkan laba hanya menjadi idealisme palsu kaum akademis. Mau tidak mau mereka membutuhkan uang, entah untuk dirinya sendiri atau keberjalanan riset tersebut. Mengulang kutipan saya terhadap kata-kata Albert Einstein, "Hampir semua ilmuan adalah orang yang dari segi ekonomi tidak bebas". Ilmuan adalah pekerjaan yang cenderung dibayar bila hasilpenemuannya bisa digunakan oleh kepentingan terkait, entah oleh industri atau pemerintah. Ilmu semakin direnggut kebebasannya dengan terus dijadikan permainan antar kepentingan. Meski begitu, sebenarnya memang hal

seperti itulah yang terjadi pada negara-negara yang telah menerapkan triple helix dengan baik. Riset-riset dikembangkan untuk kelak jadi paten yang diperjualbelikan, yang mana kemudian akan terus memicu inovasi-inovasi baru yang signifikan. Hubungan antara kaum akademis dengan bisnis pun sebenarnya tidak harus terjadi secara institusional. Rekrutmen ilmuwan-ilmuan oleh perusahaan-perusahaan untuk pengembangan produknya pun menjadi bagian dari semakin terkecangnya kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, seharusnya kampus lah yang menjadi pelindung kebebasan tersebut, namun pada akhirnya tetap saja begitu banyak dilema yang juga akhirnya menekan kampus untuk mengikuti arus peradaban ketimbang bertahan pada idealisme kebebasan pengetahuan.

Apa yang dibawa oleh ITB saat ini, sebuah konsep yang dikenal dengan entrepreneurial university mungkin dianggap sebagai sebuah solusi tersendiri untuk menengahi dilema tersebut. Definisi dari entrepreneurial university (EU) yang dijelaskan oleh ITB sebenarnya tidak cukup jelas menggambarkan apa yang sebenarnya dibangun dari konsep ini. Apa yang tercantum di renstra pendidikan ITB, yang mana menjelaskan sedikit mengenai 3 ciri EU, yakni excellence in teaching, excellence in research, excellence in innovation, sebenarnya tidak mendeskripsikan secara jelas apa yang sebenarnya ingin dicapai dari EU. Memang pendefinisian dari EU bisa

sangat beragam bergantung perspektif. Tapi pada intinya, seperti yang dijelaskan oleh National Centre for Entrepreneurship in Education (NCEE) di Inggris, EU adalah konsep yang mengedepankan enterprise sebagai kerangka berpikir untuk ditanamkan pada peserta didik maupun pengaturan riset dan inovasi di perguruan tinggi. Oxford dan Cambridge sebagai yang telah sukses menerapkan prinsip EU pantas dijadikan cermin dalam hal ini.

Kerangka Enterprise yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa menjadi penguasa diri kita sendiri, artinya tidak tunduk ataupun berada di bawah yang lain. Dalam dokumen 'The Entrepreneurial University, From Concept to Action' yang dikeluarkan oleh NCEE, terjelaskan bahwa "The Enterprise Concept focuses upon the development of the 'enterprising person and entrepreneurial mindset'. The former constitutes a set of personal skills, attributes, behavioural and motivational capacities (associated with those of the entrepreneur) but which can be used in any context (social, work, leisure etc)". Dalam konteks pengembangan ilmu dan teknologi, ini diwujudkan dalam pengendalian arah pemanfaatan ilmu dan teknologi oleh kampus agar bisa mandiri tanpa harus bergantung pada industri. Inovasi yang dikembangkan bisa lebih luhur menerapkan kebebasan pengetahuan dan tidak terkontaminasi kepentingan apapun. Kita bisa melihat contoh apa yang dimiliki Oxford, yakni Isis Innovastion Limited, sebuah perusahaan

transfer teknologi yang sepenuhnya dimiliki oleh Oxford sendiri. Karya dan aset intelektual dalam suatu kampus pun bisa lebih terfasilitasi dan dioptimalkan tanpa harus terkena campur tangan kepentingan sektor privat.

Konsep tersebut sebenarnya sudah dicoba diterapkan oleh LIPI, yang mana peneliti-peneliti di sana difasilitasi untuk memiliki paten dan kontrol terhadap karyanya sendiri. Namun, LIPI bukanlah sebuah institusi pendidikan, sehingga tidak ada unsur pengembangan manusia yang terfokus selayaknya perguruan tinggi. Di lingkungan kampus, penanaman konsep entrepreneur pada peserta didik dapat membantu

menumbuhkan kemandirian dan kreativitas. Dalam hal ini, konsep luhur pendidikan yang mana seorang manusia seharusnya memiliki kesadaran penuh akan hidupnya sendiri menjadi hal yang paralel bisa diwujudkan melalui penanaman konsep enterprise dalam pengembangan peserta didik. Namun hal yang perlu ditekankan di sini adalah penyeimbangan orientasi dan pemahaman agar tidak adanya kepincangan dalam paradigma berpikir. Walaupun begitu, tetap saja kemurnian ilmu sulit diselamatkan dari kapitalisasi, mengingat konsep entrepreneur ini tetap akan berarah pada komersialisasi dari inovasi-inovasi yang diciptakan oleh individu maupun kelompok di universitas.

Kembali pada Kontemplasi

Bagaimana ilmu seharusnya bisa jadi hak milik semua orang sepertinya memang hanya idealisme yang kelewat utopis. Apresiasi dari karya tidak sama dengan komersialisasi dari karya tersebut, termasuk karya intelektual. Salah satu yang saya rasakan juga bahwa tekanan dan godaan komersil sebagai nilai tambah yang bisa didapatkan dari terciptanya suatu karya merupakan hal yang sulit dicegah. Dalam tataran karya intelektual seperti jurnal dan makalah, memang pembatasan akses dengan adanya biaya merupakan bagian dari pencegahan plagiarisme. Pada dasarnya memang niat luhur dari adanya hak cipta adalah apresiasi terhadap pencipta, namun

sayang bila hal itu berujung pada semakin tidak bebasnya pengetahuan bagi siapapun. Tetap saja hal tersebut adalah hal yang sukar dihindari, seakan memang seharusnya seperti itu. Kapitalisasi akan semua bentuk produk manusia, termasuk ilmu sendiri sudah menjadi hal yang natural pasti terjadi dengan semua pergerakan dunia saat ini. Kampus sebagai sebuah institusi pendidikan mengalami dilema sana-sini di antara menjaga idealisme luhur pendidikan dan kebebasan ilmu dengan kebutuhan pragmatis yang muncul dari berbagai arah tekanan.

Apa yang ingin diwujudkan oleh ITB dengan konsep EU mungkin untuk menyeimbangkan dilema tersebut.

Mengenai bahwa ide tidak pantas untuk diperjualbelikan pun sangat bergantung perspektif, walau sebenarnya semangat itulah yang selalu dibawa ketika pengetahuan pertama kali berkembang secara sistematis di Yunani. Yang terpenting sesungguhnya adalah tidak melupakan tujuan sesungguhnya dari proses pendidikan, yaitu bagaimana agar manusia bisa sadar sepenuhnya dengan dirinya sendiri. Kesadaran inilah yang terwujud dalam karakter dan budaya manusia terkait. Melupakan hal-hal krusial seperti ini akan menghasilkan sarjana-sarjana pincang yang hanya akan berparadigma sempit dan nilai idealisme kuat mengenai posisinya sebagai manusia.

Seperti yang dijelaskan oleh NCEE, "it is the levels of uncertainty and complexity in any environment and the

(PHX)

associated threats and opportunities that dictate the need for entrepreneurial response". Dunia dengan zaman yang semakin maju dan tak menentu lah yang membuat kampus terus terdesak sebagai pejuang terakhir kebebasan ilmu pengetahuan. Itulah mengapa saya sebut semua ini sebagai kutukan peradaban. Karena perkembangan peradaban saat ini hanya akan terus memberi simalakama antara realita dengan idealisme yang seharusnya dijunjung. Bagaimana kelak kita akan bertahan, kita tak bisa mengetahui dengan pasti. Sebagai mahasiswa, toh saya hanya bisa mempertahankan apa yang bisa ku pertahankan dengan semua benteng terakhir idealisme serta melakukan apa yang bisa ku lakukan untuk mewujudkannya. Untuk ITB sendiri? Entahlah.

Pendidikan memiliki peran penting dalam peradaban dan kehidupan manusia. Bagaimana kita mengelolanya seharusnya menjadi pertanyaan bersama. Melihat sistem di peradaban yang sekarang sudah sangat kompleks membuat semuanya hanya menjadi simalakama. Lantas apa? Kenapa tidak mulai dari hal-hal sederhana? Sesungguhnya proses pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, maka maksimalkan lah hidup agar proses itu termaknai dengan sendirinya.

(PHX)